



BALAI GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI ACEH

#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASAMEN
RAMAH

RENCANA STRATEGIS BALAI GTK PROVINSI ACEH



RENSTRA 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga wajib menyusun perencanaan program kerja secara selaras, terukur, dan berkelanjutan sesuai arah Pembangunan Nasional. Untuk mendukung tujuan tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mekanisme pengelolaan kinerja yang terintegrasi. Penyelenggaraan SAKIP mencakup rangkaian proses mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja yang harus dilaksanakan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting karena merupakan dokumen arah kebijakan kinerja yang menjadi pedoman utama setiap unit kerja dalam menjalankan mandatnya selama periode lima tahun. Renstra yang tersusun dengan baik akan memberikan arah yang jelas, memastikan keterpaduan antara program dan sasaran kinerja, serta membangun keselarasan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat operasional.

Renstra Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh Tahun 2025–2029 hadir sebagai wujud komitmen lembaga dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, arah kebijakan, serta strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Seluruh rumusan di dalamnya telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh.

Harapan besar kami bahwa Renstra ini dapat menjadi pedoman bersama bagi seluruh unsur BGTK Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan secara efektif, terukur, dan berkesinambungan. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kemudahan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap ikhtiar yang dilakukan, agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di tanah air, khususnya di Provinsi Aceh.

Aceh Besar, 17 November 2025

Kepala



Muhammadi, S.Kom., M.Si.
NIP. 197409192002121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Kondisi Umum.....	6
B. Potensi dan Permasalahan	22
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	25
A. Visi BGTK Provinsi Aceh	25
B. Misi BGTK Provinsi Aceh.....	27
C. Tujuan BGTK Provinsi Aceh	29
D. Sasaran Kinerja/Kegiatan BGTK Provinsi Aceh	32
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	41
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen	41
B. Arah Kebijakan dan Strategi BGTK Provinsi Aceh	44
C. Kerangka Regulasi BGTK Provinsi Aceh	46
D. Kerangka Kelembagaan BGTK Provinsi Aceh.....	49
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	63
A. Target Kinerja	63
B. Kerangka Pendanaan.....	66
BAB V PENUTUP.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Provinsi Aceh	9
Gambar 1. 2 Data PTK di Provinsi Aceh Tahun 2025	17
Gambar 1. 3 Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2023	20
 Gambar 2.1 Proses Cascading (penjabaran) Visi BGTK Provinsi Aceh Tahun 2025-2029	 26
Gambar 2.2 Proses Cascading (penjabaran) Misi BGTK Provinsi Aceh Tahun 2025-2029	 28
Gambar 2.3 Proses Cascading (penjabaran) Tujuan BGTK Provinsi Aceh.....	29
 Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BGTK Provinsi Aceh.....	 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 SK dan IKK pada Renstra BGP Provinsi Aceh Tahun 2020 - 2024	10
Tabel 1. 2 Capaian Kinerja BGP Provinsi Aceh Periode Renstra 2020 - 2024	12
Tabel 1. 3 Formulir Rencana Strategis BGTK Provinsi Aceh Tahun 2025-2029.....	14
Tabel 1. 4 Data PTK di Provinsi Aceh Tahun 2025	17
Tabel 2. 1 Rumusan Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja BGTK Provinsi Aceh.....	29
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran Kinerja/Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BGTK Provinsi Aceh	32
Tabel 2. 3 Target Kinerja Periode Renstra 2025 - 2029	44
Tabel 2. 4 Penerapan Kriteria SMART pada IKK BGTK Provinsi Aceh	35
Tabel 2. 5 Indikasi Risiko pada Sasaran Kegiatan BGTK Provinsi Aceh	36
Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen	41
Tabel 3. 2 Arah Kebijakan dan Strategi BGTK Provinsi Aceh	44
Tabel 3. 3 Hubungan Kerja Antar Unit BGTK Provinsi Aceh	51
Tabel 4. 1 Target Kinerja BGTK Provinsi Aceh Tahun 2025-2029.....	63
Tabel 4. 2 Keselarasan Target Kinerja BGTK Provinsi Aceh dengan Tugas dan Fungs65	
Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Pagu 2025	66
Tabel 4. 4 Kerangka Pendanaan Pagu 2026 - 2029.....	67

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Perkembangan teknologi yang begitu cepat pada abad ke-21 telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk pola ekonomi yang sebelumnya bertumpu pada sumber daya alam kini beralih menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam perubahan ini, kemampuan berinovasi, berkolaborasi, serta menghasilkan kreativitas baru menjadi faktor kunci dalam mendukung kemajuan. Oleh karena itu, perencanaan program pada setiap lembaga, khususnya lembaga pemerintah, harus didasarkan pada analisis data yang akurat, relevan, dan mampu menggambarkan kebutuhan aktual.

Percepatan transformasi ekonomi nasional menuju visi pembangunan 2045 menempatkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu prioritas utama. Daya saing bangsa di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi hanya dapat dicapai melalui SDM yang kompeten, adaptif, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Pendidikan menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, serta siap menjawab tantangan dunia yang terus berkembang.

Arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yaitu menghadirkan layanan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama menuju Indonesia Emas 2045. Kemendikdasmen berperan memastikan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM sektor pendidikan dilakukan secara terarah dan komprehensif, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi global, dinamika sosial budaya, perubahan lingkungan, serta kebutuhan dunia kerja masa depan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kemendikdasmen menetapkan beberapa fokus kebijakan strategis, antara lain: (1) Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah yang inklusif dan berkeadilan. (2) Penguatan layanan pendidikan anak usia dini dan prasekolah. (3) Peningkatan mutu pembelajaran, kurikulum, pengajaran, serta sistem evaluasi pendidikan. (4) Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan. (5) Penguatan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. (6) Pengembangan kebahasaan dan kesastraan daerah



serta penguatan Bahasa Indonesia di tingkat global. (7) Perbaikan tata kelola dan pembiayaan pendidikan. (8) Penguatan akuntabilitas dan tata kelola internal kementerian.

Peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran guru dan tenaga kependidikan yang profesional serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) terus mendorong program pengembangan profesional berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, seperti pusat pengembangan guru, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, serta dunia kerja. Sinergi antar pihak ini menjadi landasan penting untuk memastikan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan berjalan efektif dan berkesinambungan.

Gambaran BGTK Provinsi Aceh

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan menegaskan bahwa Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) memiliki tugas utama untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh (BGTK Provinsi Aceh) memegang peran strategis sebagai institusi yang menjadi penggerak peningkatan mutu SDM pendidikan di Aceh.

Lembaga ini beroperasi dalam konteks perubahan dunia pendidikan yang berlangsung sangat cepatmulai dari perkembangan teknologi, perubahan pendekatan pembelajaran, hingga tuntutan kompetensi baru bagi pendidik. Oleh karena itu, BGTK Provinsi Aceh menempatkan komitmen untuk membangun guru dan tenaga kependidikan yang adaptif, kreatif, inovatif, dan produktif sebagai prioritas utama. Hal ini diwujudkan melalui program-program yang responsif terhadap kebutuhan daerah dan selaras dengan kebijakan nasional.

Sebagai UPT setingkat Eselon III, BGTK Provinsi Aceh berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan



Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG). Lembaga ini merupakan hasil transformasi dari Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh, yang sebelumnya merupakan bagian dari Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Aceh.

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025, struktur organisasi BGTK Provinsi Aceh terdiri atas Kepala Balai, Subbagian Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugasnya, BGTK Provinsi Aceh didukung oleh 61 pegawai, dengan komposisi 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 27 Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan 1 tenaga outsourcing.

BGTK Provinsi Aceh berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, menempati lahan yang dilengkapi dengan beberapa gedung operasional yang digunakan untuk menunjang aktivitas kelembagaan, mulai dari ruang pelatihan, aula pertemuan, hingga area administrasi. Aset yang dikelola mencakup bangunan, peralatan, jaringan infrastruktur, serta perangkat lunak pendukung, dan keseluruhannya dicatat serta dikelola melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

BGTK Provinsi Aceh memiliki wilayah kerja yang meliputi 23 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh. Wilayah ini terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota, yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, serta Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam. Sebaran wilayah yang sangat beragam ini mulai dari daerah kepulauan, pesisir, hingga dataran tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pemerataan layanan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kondisi geografis yang berbeda-beda menuntut BGTK Provinsi Aceh untuk menerapkan strategi layanan yang adaptif, efektif, dan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah.

Dengan cakupan wilayah yang luas tersebut, BGTK Provinsi Aceh memiliki peran vital sebagai penghubung antara kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal, sekaligus memastikan bahwa guru dan tenaga kependidikan di seluruh Aceh memperoleh akses yang setara terhadap berbagai program pengembangan profesional. Hal ini meliputi penguatan kapasitas pedagogik, peningkatan kompetensi digital, pengembangan kepemimpinan pembelajaran, hingga pembinaan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan di daerah.

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Provinsi Aceh



Capaian Kinerja Periode Renstra 2020 - 2024

BGTK Provinsi Aceh, yang pada periode 2022-2024 masih beroperasi dengan nama Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh, telah berhasil menyelesaikan seluruh target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan kinerja kelembagaan yang kuat serta kemampuan adaptasi terhadap berbagai perubahan kebijakan nasional di bidang pendidikan. Seluruh program yang dilaksanakan pada periode tersebut juga menjadi dasar penting bagi penguatan fungsi, tata kelola, dan arah strategis BGTK Provinsi Aceh pada periode berikutnya.

Dalam kerangka evaluasi kinerja, Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi acuan Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh pada Renstra 2020-2024 merupakan tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya mencerminkan tingkat pencapaian program, tetapi juga

menggambarkan kontribusi Balai dalam mendukung prioritas pendidikan nasional.

Adapun Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dijalankan selama periode Rencana Strategis 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 SK dan IKK pada Renstra BGP Provinsi Aceh Tahun 2020 - 2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan						
IKK 1.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	Orang	-	-	1.134	1.512	3.024
IKK 1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	Orang	-	-	9.347	9.347	9.347
IKK 1.3	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	Orang	-	-	622	782	782
SK 2	Meningkatnya Tata Kelola Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh (BGP Provinsi Aceh)						
IKK 2.1	Predikat SAKIP BGP Provinsi Aceh minimal BB	Nilai	-	-	BB	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Aceh Minimal 93	Predikat	-	-	92,7	95	99,35

Sumber : Perubahan Renstra BGP Provinsi Aceh (12 Februari 2024)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 yang dihimpun dari dokumen Perubahan Renstra BGP Provinsi Aceh Tahun 2020–2024, terdapat dua Sasaran Kegiatan (SK) dengan total lima Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi dasar pelaksanaan program

selama periode tersebut. Seluruh indikator ini merupakan bentuk penjabaran dari sasaran strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang kemudian dioperasionalkan oleh BGP yang sekarang BGTK Provinsi Aceh pada rentang tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Pada Sasaran Kegiatan 1 (SK 1), yaitu Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan, terdapat tiga indikator utama.

Pertama, IKK 1.1 yang mengukur jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru. Target tahunan yang ditetapkan adalah 1.134 orang pada tahun 2022, meningkat menjadi 1.512 orang pada 2023, dan mencapai 3.024 orang pada 2024, mencerminkan perluasan cakupan layanan pelatihan. Kedua, IKK 1.2 yang menargetkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan inovasi pembelajaran. Target yang ditetapkan yaitu 9.367 orang pada tahun 2022, 9.367 orang pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 19.367 orang pada tahun 2024, sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan penguatan kompetensi literasi, numerasi, dan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, IKK 1.3 yakni jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru. Target bertahap ditetapkan 622 orang pada 2022, 782 orang pada 2023, dan 782 orang pada 2024.

Sementara itu, Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) berfokus pada Meningkatnya Tata Kelola BGP Provinsi Aceh. SK ini diukur melalui dua indikator utama. IKK 2.1 menetapkan target predikat SAKIP minimal BB setiap tahun, sebagai standar akuntabilitas kinerja organisasi. Sedangkan IKK 2.2 menargetkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) minimal 93 setiap tahun, dengan target terukur mulai dari 92,7 points pada 2022 hingga 99,35 points pada 2024, menggambarkan upaya memperkuat efektivitas pengelolaan anggaran dan proses pelaksanaan kegiatan.

Seluruh SK dan IKK tersebut dilaksanakan secara konsisten pada tahun anggaran 2022 hingga 2024 sebagai bentuk komitmen BGP—kini BGTK—Provinsi Aceh dalam mendukung peningkatan kompetensi guru dan penguatan tata kelola organisasi. Target yang ditetapkan dalam tabel tersebut kemudian menjadi dasar evaluasi kinerja yang hasil ketercapaiannya ditampilkan pada tabel berikutnya, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas pelaksanaan Renstra BGP Provinsi Aceh periode 2020–2024.

Tabel 1. 2 Capaian Kinerja BGP Provinsi Aceh Periode Renstra 2020 - 2024

Sasaran Kegiatan [SK]	Indikator Kinerja Kegiatan [IKK]	Target Renstra 2020 - 2024	Total Realisasi 2020 - 2024	Persentase Ketercapaian 2020 - 2024
[SK 1] Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	[IKK 1.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	5.670	6.362	100.00%
	[IKK 1.2] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	28.041	26.629	100.00%
	[IKK 1.3] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	2.186	2.091	100.00%
[SK 2] Meningkatnya Tata Kelola Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh (BGP Provinsi Aceh)	[IKK 2.1] Predikat SAKIP BGP Provinsi Aceh minimal BB	BB (73.15)	BB (73.15)	100.00%
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Aceh	87	99.35	108.75%

Berdasarkan Tabel 1.2, capaian kinerja BGTK Provinsi Aceh (sebelumnya BGP Aceh) pada periode Renstra 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) terkait peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, total target kumulatif selama lima tahun adalah 30.189 orang. Namun, realisasi yang dicapai mencapai 35.052 orang, sehingga persentase ketercapaian mencapai 116.1%. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan kompetensi telah berjalan jauh melampaui ekspektasi yang direncanakan dan berhasil menjangkau lebih banyak pendidik dari target awal.

Selanjutnya pada Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) yang berfokus pada peningkatan tata kelola lembaga, capaian kinerja juga menunjukkan hasil yang optimal. Predikat SAKIP



BGP Provinsi Aceh berhasil mencapai kategori BB (73.15) sesuai target, dengan persentase ketercapaian 100%. Sementara itu, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) justru melampaui target, dari target 89 menjadi realisasi 97.35, sehingga tingkat ketercapaian mencapai 108.75%. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola anggaran dan pelaksanaan program di BGP Aceh telah berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai standar kinerja yang ditetapkan pemerintah.

Keberhasilan pada aspek tata kelola tersebut tidak hanya menunjukkan peningkatan kualitas manajemen internal, tetapi juga memperkuat fondasi BGTK Provinsi Aceh dalam menjalankan fungsi layanan yang lebih profesional pada periode Renstra berikutnya. Pencapaian ini menjadi modal penting bagi lembaga untuk terus meningkatkan integritas, akuntabilitas, serta transparansi dalam penyelenggaraan program pada fase transisi kelembagaan dari BGP menjadi BGTK, sekaligus menjadi komitmen awal dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan.

Ke depan, keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong penguatan kinerja kelembagaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, khususnya dalam menghadapi tantangan transformasi pendidikan di era digital. Dengan capaian tata kelola yang solid, BGTK Provinsi Aceh memiliki landasan yang kuat untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas program pengembangan kompetensi, serta membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan demi tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik di seluruh wilayah Aceh.

Secara keseluruhan, hasil realisasi kinerja pada periode Renstra 2020–2024 memberikan gambaran bahwa BGTK Provinsi Aceh memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dalam menjalankan program prioritas, baik pada aspek peningkatan kompetensi GTK maupun pada sisi akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting bagi BGTK Provinsi Aceh untuk menyusun Renstra periode 2025–2029 dengan lebih terarah, ambisius, dan realistis, serta memastikan kesinambungan peningkatan mutu layanan GTK di seluruh wilayah Aceh :

Tabel 1. 3 Formulir Rencana Strategis BGTK Provinsi Aceh Tahun 2025-2029

UNIT	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	IKK	BASE LINE 2024	TARGET					RENCANA ANGGARAN				
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
BGTK PROVINSI ACEH	Terwujudnya guru dan tenaga kependidikan Provinsi Aceh yang kompeten, berintegritas, adaptif, dan berdaya saing global untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, serta berkeadilan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045	Melaksanakan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan di Provinsi Aceh.	Menguatnya mutu layanan pendidikan pada seluruh jenjang melalui peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Aceh.	Meningkatnya kualitas pengembangan dan pemberdayaan guru serta tenaga kependidikan di Provinsi Aceh	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	-	1,49%	3,13%	4,93%	6,92%	9,1%	25.957.104.000	34.937.762.000	-	-	-
		Mengembangkan model peningkatan kompetensi yang relevan dan inovatif bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.														
		Mengembangkan media dan perangkat pembelajaran untuk mendukung kualitas proses belajar-mengajar.														
		Menyelenggarakan program peningkatan kompetensi secara berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.														
		Memfasilitasi berbagai bentuk layanan peningkatan kompetensi melalui pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi.														
		Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan program pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.														
		Melakukan pemantauan dan evaluasi seluruh program pengembangan dan pemberdayaan GTK.	Menguatnya tata kelola program pengembangan dan pemberdayaan guru serta tenaga kependidikan yang partisipatif, transparan, efektif, dan akuntabel.	Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Aceh yang efektif, transparan, dan akuntabel	Capaian NKA Balai GTK Provinsi Aceh minimal sangat baik	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	112.284.000	110.184.000	-	-	-	
		Membangun dan memperluas kemitraan strategis dalam mendukung peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.			Predikat AKIP Balai GTK Provinsi Aceh minimal A	-	A	A	A	A	5.739.665.000	14.294.202.000	-	-	-	
		Menyelenggarakan layanan administrasi dan tata kelola BGTK Aceh secara efektif, efisien, dan akuntabel.														
Keterangan : * : Sumber Data DIPA Revisi 2025 ** : Sumber Data Pagu Indikatif 2026												31.839.053.000	49.342.148.000	-	-	-
JUMLAH																

Berdasarkan Formulir Rencana Strategis yang telah disusun, terlihat bahwa kolom Target dan Rencana Anggaran untuk periode tahun 2027 hingga 2029 belum memuat data. Kondisi ini terjadi karena hingga saat ini Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru belum menetapkan rincian target kinerja maupun proyeksi anggaran pada tahun-tahun tersebut. Ketiadaan arahan dan data pendukung dari kementerian menyebabkan satuan kerja belum memiliki dasar yang memadai untuk menampilkan rencana target dan penganggaran secara lebih detail.

Sementara itu, data untuk tahun 2026 sudah dapat disajikan karena telah tersedianya Pagu Indikatif yang diperoleh melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) (<https://sakti.kemenkeu.go.id/>). Informasi yang diakses melalui aplikasi tersebut menjadi acuan awal dalam penyusunan rencana program dan kebutuhan anggaran pada tahun berjalan, meskipun masih bersifat indikatif dan dapat mengalami penyesuaian pada tahap perencanaan berikutnya.

Dengan demikian, pengisian data untuk tahun 2027-2029 akan dilakukan secara bertahap seiring dengan diterbitkannya pedoman resmi, kebijakan target kinerja, serta rincian alokasi anggaran dari Kemendikdasmen dan Ditjen GTKPG. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan yang disusun BGTK Provinsi Aceh selaras dengan arah kebijakan nasional dan memiliki landasan data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi Umum Pendidikan

Ketersediaan data pendidik dan tenaga kependidikan yang akurat merupakan fondasi penting dalam perencanaan program peningkatan mutu pendidikan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan di seluruh Aceh, BGTK Provinsi Aceh memerlukan gambaran komprehensif mengenai jumlah, karakteristik, dan persebaran pendidik di berbagai jenjang pendidikan. Data ini menjadi dasar bagi lembaga dalam merumuskan kebijakan, merancang program, dan menyesuaikan intervensi berdasarkan kebutuhan aktual setiap daerah.

Melalui proses pemetaan yang dilakukan dan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIM Data) BGTK, diperoleh informasi bahwa Provinsi Aceh memiliki sebanyak 141.980 pendidik dan tenaga kependidikan yang tersebar pada berbagai



jenis satuan pendidikan. Jumlah ini mencerminkan besarnya ekosistem tenaga pendidikan yang perlu mendapatkan layanan pengembangan kompetensi secara merata dan berkelanjutan.

Jika dilihat berdasarkan jenjang, jumlah PTK terbesar berada pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Pada jenjang SD dan sederajat, terdapat 57.874 PTK, yang menjadikan kelompok ini sebagai unsur terbesar dalam sistem pendidikan Aceh. Jumlah besar juga terlihat pada jenjang SMP dan sederajat dengan 30.488 PTK, serta pada SMA yang mencapai 18.068 PTK dan SMK dengan 9.201 PTK. Keempat jenjang ini merupakan tulang punggung pendidikan dasar dan menengah, sehingga peningkatan kompetensi guru di jenjang-jenjang tersebut menjadi prioritas strategis untuk mendongkrak mutu pendidikan di Aceh secara keseluruhan.

Di sisi lain, jumlah pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini juga sangat signifikan. Terdapat 14.654 PTK pada satuan TK dan sederajat, 6.564 pada Kelompok Bermain (KB), 384 pada Tempat Penitipan Anak (TPA), serta 485 pada Satuan PAUD Sejenis (SPS). Besarnya jumlah PTK PAUD menunjukkan tingginya kebutuhan peningkatan kompetensi pendidik pada masa usia emas peserta didik, terutama karena kualitas layanan PAUD terbukti sangat mempengaruhi kesiapan belajar anak pada jenjang berikutnya.

Pada jenjang pendidikan khusus, terdapat 1.649 PTK di Sekolah Luar Biasa (SLB). Pendidik pada jenjang ini membutuhkan penguatan kompetensi yang sangat spesifik, terutama terkait kebutuhan individual peserta didik, pendekatan pembelajaran berbasis diferensiasi, serta keterampilan terapi pendidikan. Selain itu, terdapat 2.613 PTK pada jalur pendidikan nonformal (DIKMAS), yang berperan penting dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di luar jalur formal.

Jika dilihat dari sebarannya, tenaga pendidik dan kependidikan tersebut tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota di Aceh, mulai dari area perkotaan seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe hingga wilayah kepulauan seperti Simeulue dan daerah pedalaman seperti Gayo Lues, Aceh Singkil, Pulau Simeulue dan lain sebagainya. Kondisi geografis ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pelatihan, pendampingan, dan pengembangan profesional, sehingga BGTK Provinsi Aceh dituntut untuk menerapkan strategi layanan yang adaptif, fleksibel, dan sensitif terhadap konteks lokal.

Ketersediaan data yang lengkap tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan

kualitas guru dan tenaga kependidikan tidak dapat dilakukan secara seragam. Setiap jenjang, wilayah, dan jenis satuan pendidikan memiliki kebutuhan kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, BGTK Provinsi Aceh memanfaatkan data ini sebagai dasar dalam merumuskan intervensi program yang lebih tepat sasaran, mulai dari peningkatan kompetensi literasi-numerasi, penguatan kompetensi digital, pengembangan kepemimpinan pembelajaran, hingga peningkatan profesionalisme melalui sertifikasi dan komunitas belajar.

Dengan berlandaskan data jumlah PTK yang besar dan beragam tersebut, BGTK Provinsi Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan program penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan secara terstruktur dan berkelanjutan guna meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah Aceh.

Gambar 1. 2 Data PTK di Provinsi Aceh Tahun 2025

TK/ Sederajat	KB/ Sederajat	TPA	SPS	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	SMK/ Sederajat	SLB	DIKMAS	Total
14.654	6.564	384	485	57.874	30.488	18.068	9.201	1.649	2.613	141.980

Data di atas merupakan hasil agregasi

Tabel 1. 4 Data PTK di Provinsi Aceh Tahun 2025

No	Nama Wilayah	TK	KB	TPA	SPS	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
1	Kab. Aceh Besar	1.075	283	7	1	3.075	1.614	1.301	603	99	8.058
2	Kab. Pidie	857	280	7	0	4.765	2.379	1.329	583	80	10.280
3	Kab. Aceh Utara	1.462	472	40	128	6.618	3.864	1.863	954	91	15.492
4	Kab. Aceh Timur	671	956	37	45	4.949	2.158	1.037	688	38	10.579
5	Kab. Aceh Tengah	830	91	25	0	3.089	1.290	629	360	203	6.517
6	Kab. Aceh Barat	687	169	7	5	2.416	1.205	617	435	64	5.605
7	Kab. Aceh Selatan	849	734	2	17	2.878	1.403	1.320	454	46	7.703
8	Kab. Aceh Tenggara	657	395	18	1	2.942	1.747	930	467	57	7.214
9	Kab. Simeulue	606	209	6	0	1.994	951	629	216	11	4.622
10	Kab. Bireuen	1.279	443	36	0	4.387	3.003	1.456	616	145	11.365
11	Kab. Aceh Singkil	600	53	16	0	1.818	910	401	217	24	4.039
12	Kab. Aceh Tamiang	659	99	7	14	2.579	1.517	1.046	472	67	6.460
13	Kab. Nagan Raya	266	398	0	8	2.042	865	561	126	45	4.311
14	Kab. Aceh Jaya	375	248	2	23	1.421	757	307	187	19	3.339
15	Kab. Aceh Barat Daya	366	433	24	30	1.763	854	562	200	23	4.255
16	Kab. Gayo Lues	265	123	7	0	1.272	664	366	106	52	2.855
17	Kab. Bener Meriah	736	168	68	12	1.943	1.102	566	220	111	4.926
18	Kab. Pidie Jaya	428	248	3	0	2.045	993	561	288	53	4.619

No	Nama Wilayah	TK	KB	TPA	SPS	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
19	Kota Sabang	125	79	17	10	456	258	133	59	26	1.163
20	Kota Banda Aceh	873	179	16	187	1.877	1.085	1.215	640	222	6.294
21	Kota Lhokseumawe	557	152	13	0	1.788	928	577	668	85	4.768
22	Kota Langsa	205	296	8	0	1.236	765	441	470	84	3.505
23	Kota Subulussalam	457	185	33	16	1.226	543	346	215	27	3.048

Ketersediaan data pendidik dan tenaga kependidikan yang akurat merupakan fondasi utama dalam merancang program peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Aceh. Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mengembangkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, BGTK Provinsi Aceh memerlukan informasi komprehensif mengenai jumlah, karakteristik, dan persebaran PTK di seluruh jenjang pendidikan. Data ini menjadi landasan bagi perumusan kebijakan, penyusunan prioritas program, serta penentuan intervensi yang benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Berdasarkan hasil pemetaan melalui Sistem Informasi Manajemen Data (SIM Data), jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Aceh mencapai 141.980 orang. Angka tersebut menunjukkan besarnya ekosistem pendidikan yang harus dilayani secara merata dan berkelanjutan oleh BGTK Provinsi Aceh. Jumlah PTK terbesar berada pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Pada jenjang SD terdapat 57.874 PTK, sementara pada jenjang SMP jumlahnya mencapai 30.488 PTK, diikuti SMA sebanyak 18.068 PTK dan SMK sebanyak 9.201 PTK. Besarnya jumlah PTK di empat jenjang utama ini menjadikan peningkatan kompetensi guru pendidikan dasar dan menengah sebagai prioritas strategis untuk mendorong peningkatan mutu pembelajaran di Aceh secara menyeluruh.

Pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), jumlah PTK juga terbilang sangat besar. Data menunjukkan terdapat 14.654 PTK di Taman Kanak-Kanak, 6.564 PTK di Kelompok Bermain, 384 PTK di Tempat Penitipan Anak, dan 485 PTK pada Satuan PAUD Sejenis. Banyaknya pendidik PAUD ini menggambarkan kebutuhan yang tinggi dalam peningkatan kompetensi pendidik pada masa usia emas perkembangan anak, terutama terkait stimulasi perkembangan, pembelajaran berbasis bermain, serta penguatan literasi dan numerasi awal.



Pada wilayah layanan pendidikan khusus, tercatat 1.649 PTK yang bertugas di Sekolah Luar Biasa (SLB). Pendidik pada jenjang ini membutuhkan kompetensi yang sangat spesifik, termasuk keterampilan asesmen individual, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, dan pemahaman terkait kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik. Sementara itu, jalur pendidikan nonformal (DIKMAS) memiliki 2.613 PTK yang berperan penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang belajar di luar sekolah formal.

Seluruh PTK tersebut tersebar di berbagai wilayah kabupaten/kota di Aceh, dengan kondisi geografis yang sangat beragam, mulai dari wilayah perkotaan seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe, daerah pedalaman seperti Gayo Lues dan Aceh Tenggara, hingga wilayah kepulauan seperti Simeulue. Sebaran geografis yang luas ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam memastikan pemerataan layanan pengembangan kompetensi, sehingga BGTK Provinsi Aceh dituntut untuk mengembangkan pendekatan layanan yang adaptif, fleksibel, dan berbasis konteks lokal, termasuk melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran digital.

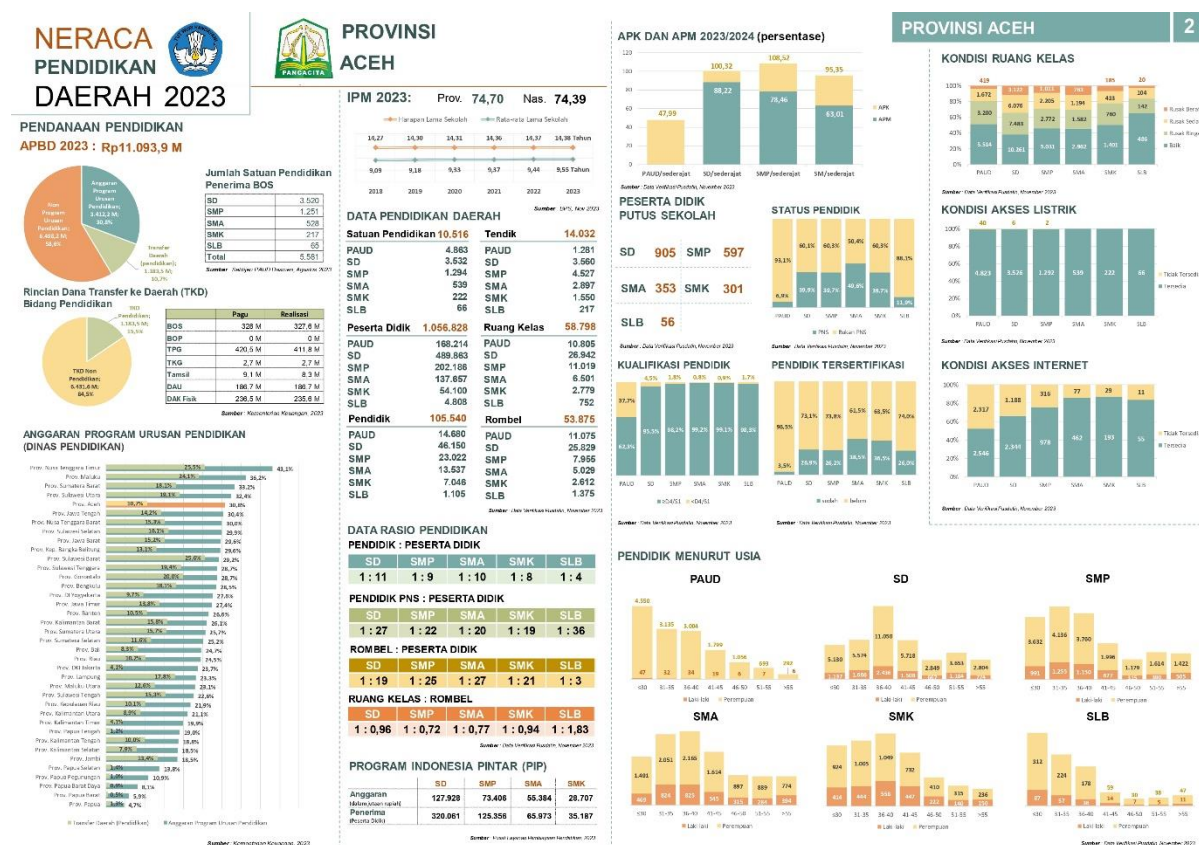
Data terbaru mengenai jumlah PTK tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan tidak dapat dilakukan secara seragam. Setiap jenjang, wilayah, dan jenis satuan pendidikan memiliki kebutuhan kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, BGTK Provinsi Aceh memanfaatkan data ini sebagai dasar dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, mulai dari peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional, penguatan literasi dan numerasi, transformasi digital guru, peningkatan kompetensi kepemimpinan sekolah, hingga penguatan komunitas belajar berbasis kebutuhan daerah.

Dengan memahami bahwa Provinsi Aceh memiliki 141.980 pendidik dan tenaga kependidikan yang tersebar di seluruh wilayah dengan tantangan dan kebutuhan yang berbeda, BGTK Provinsi Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat layanan pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan secara terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di Aceh sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam pencapaian pembangunan pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pendidikan di Provinsi

Aceh, salah satu sumber data yang komprehensif dan mutakhir adalah Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang disajikan oleh Kemendikbudristek melalui laman npd.kemdikbud.go.id. Dokumen ini menyajikan berbagai indikator penting terkait layanan pendidikan, mulai dari pendanaan, capaian pembangunan, kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, hingga kesiapan infrastruktur pendidikan. Penyajian data dalam bentuk visual dan analitis memungkinkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membaca tren, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah strategis berbasis bukti (*evidence-based policy*). Berikut disajikan gambaran umum Neraca Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2023.

Gambar 1. 3 Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2023



Neraca Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2023 memberikan potret komprehensif mengenai perkembangan pendidikan di Aceh dari berbagai aspek. Dari sisi pendanaan, APBD Aceh mengalokasikan lebih dari Rp11 triliun untuk sektor pendidikan, mencerminkan komitmen daerah terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan. Transfer Dana Pendidikan melalui BOS, BOP, TPG, serta DAK Fisik dan Nonfisik juga memperkuat dukungan pembiayaan untuk satuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota.



Pada aspek capaian pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh berada pada angka 74,70 yang menunjukkan adanya peningkatan, meskipun masih terdapat ruang untuk mempercepat pertumbuhan terutama pada komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan capaian yang cukup tinggi pada jenjang SMP/ sederajat (108,52%) dan SMA/ sederajat (95,35%). Namun, Angka Partisipasi Murni (APM) masih menunjukkan variasi antar jenjang, terutama pada PAUD dan SMP yang masih perlu mendapatkan perhatian.

Data terkait peserta didik putus sekolah menunjukkan masih adanya tantangan, khususnya pada jenjang SMP dengan jumlah 597 siswa. Hal ini menandakan perlunya intervensi yang lebih kuat dalam mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah rentan dan wilayah geografis yang sulit dijangkau.

Dari sisi pendidik, kondisi kualifikasi dan sertifikasi guru relatif baik pada jenjang SMP dan SMA, namun masih perlu penguatan pada jenjang PAUD dan SD agar standar kualitas pendidik dapat merata. Akses infrastruktur pendidikan seperti listrik dan internet tergolong cukup baik, namun ketersediaan ruang kelas yang rusak ringan hingga rusak berat masih menjadi pekerjaan besar di beberapa jenjang dan kabupaten/kota.

Jika ditinjau dari rasio guru–peserta didik, Aceh memiliki rasio yang relatif ideal, sehingga distribusi pendidik menjadi isu utama dibandingkan jumlah total guru. Data ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan redistribusi guru antarwilayah dan antarjenjang agar layanan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.

Secara umum, Neraca Pendidikan Provinsi Aceh menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pada sejumlah indikator penting, masih ada aspek yang memerlukan perhatian strategis terutama terkait pemerataan mutu, distribusi layanan, serta penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

B. Potensi dan Permasalahan

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di wilayah Aceh. Dengan berpegang pada prinsip layanan IKHLAS yaitu Integritas, Kompeten, Humanis, Lugas, Akuntabel, Sinergis, BGTK Provinsi Aceh menempatkan dirinya sebagai mitra strategis bagi tenaga



pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai program unggulan yang relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini, seperti Program Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA), Pembelajaran Mendalam, Pelatihan Guru Bimbingan Konseling, Pelatihan Matematika Gembira, serta pelatihan bagi tenaga kependidikan seperti laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi sekolah. Seluruh program tersebut dirancang untuk mempersiapkan guru menghadapi tantangan pembelajaran abad ke-21 dan mendorong terciptanya pembelajaran yang adaptif dan inovatif di seluruh Aceh.

Potensi kelembagaan BGTK Provinsi Aceh juga diperkuat oleh beberapa peluang strategis. Masih terdapat satuan pendidikan yang memiliki jumlah guru ASN melebihi kebutuhan, sehingga memungkinkan redistribusi dan optimalisasi penempatan guru secara lebih proporsional. Pemerintah pusat terus menunjukkan perhatian besar terhadap sektor pendidikan melalui tren peningkatan alokasi anggaran sejak tahun 2017. Selain itu, tersedianya platform digital pendidikan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi pendidik dalam berbagi praktik baik dan mengakses sumber belajar yang lebih beragam. Kebijakan Kemendikdasmen terkait perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah, penguatan layanan PAUD, peningkatan kualitas pembelajaran, dan penguatan peran pendidik dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang akuntabel juga menjadi landasan bagi Aceh untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan.

Meskipun memiliki potensi yang besar, sektor pendidikan Aceh masih menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan persebaran guru ASN. Hanya sebagian kecil satuan pendidikan yang memiliki guru ASN dalam jumlah memadai, sementara ribuan sekolah lainnya mengalami kelebihan atau kekurangan guru. Ketidakseimbangan ini berdampak pada kualitas layanan pembelajaran dan membutuhkan strategi redistribusi yang konsisten antara Kemendikdasmen dan pemerintah daerah agar kebutuhan guru di seluruh Aceh dapat terpenuhi secara lebih merata.

Penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga masih menghadapi tantangan. Secara nasional, skor Uji Kompetensi Guru (UKG) masih berada di bawah standar kompetensi, dan kondisi tersebut juga tercermin di Aceh. Banyak guru belum mencapai skor minimal, sehingga diperlukan upaya intensif dalam meningkatkan mutu pendidikan



profesi dan proses seleksi guru baru. Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelatihan guru yang dilakukan secara masif tanpa diferensiasi kurang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan keprofesian guru harus dilakukan melalui ekosistem belajar yang berkelanjutan dan berbasis komunitas, yang sayangnya belum berjalan optimal di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Belum semua wilayah memiliki pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan komunitas guru, sementara intervensi pemberdayaan ekosistem belajar masih bersifat terbatas.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan kualitas pengajaran. Inovasi guru dalam menerapkan kurikulum masih kurang, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik belum memadai, dan pemilihan strategi pembelajaran sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas asesmen pembelajaran yang dilakukan di kelas. Di Provinsi Aceh, tantangan ini semakin nyata dengan masih terbatasnya penguasaan teknologi informasi di kalangan guru, padahal kemampuan digital menjadi salah satu kompetensi penting dalam pembelajaran modern.

Dalam bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK), Aceh masih kekurangan guru dengan keahlian produktif untuk melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Minimnya tenaga pendidik yang mampu memberikan dukungan keterampilan vokasional turut menjadi hambatan dalam mempersiapkan lulusan PK-PLK agar siap memasuki dunia kerja. Kondisi ketenagaan secara keseluruhan juga menunjukkan bahwa layanan peningkatan mutu bagi tenaga kependidikan belum sepenuhnya memadai.

Berdasarkan dokumen Paparan Pembangunan ZI-WBK BGTK Provinsi Aceh, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar, seperti rendahnya skor rata-rata UKG yang belum mencapai 60, rendahnya kompetensi guru pada seluruh jenjang pendidikan, serta capaian literasi dan numerasi yang masih berada pada tingkat rendah. Rata-rata nilai literasi di Aceh sebesar 65,77 dan rata-rata nilai numerasi 46,79 menunjukkan masih perlunya peningkatan intensif dalam pembelajaran dasar. Jumlah guru yang berperan sebagai agen transformasi kepemimpinan pembelajaran baru mencapai 1.765 orang, sementara kepala sekolah yang berfungsi sebagai katalisator perubahan baru berjumlah 424 orang. Partisipasi dalam Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang (UKKJ) juga masih rendah dengan jumlah peserta 1.293 orang, sementara



guru yang belum tuntas dalam proses sertifikasi mencapai 3.447 orang. Selain itu, penilaian kinerja guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa BGTK Provinsi Aceh memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di Aceh. Melalui pengembangan program yang tepat sasaran, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BGTK Provinsi Aceh berkomitmen untuk menjadi lembaga yang mampu memperkuat kompetensi guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan demi mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing di Provinsi Aceh.

Ke depan, BGTK Provinsi Aceh akan terus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola, serta memperluas jangkauan layanan pengembangan profesi agar dapat merespons dinamika kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penyusunan model pelatihan yang inovatif, perbaikan sistem pemetaan kompetensi, peningkatan kualitas fasilitator dan widyaiswara, serta penguatan ekosistem belajar yang mendorong praktik pembelajaran yang kreatif dan relevan dengan konteks lokal.

Selain itu, BGTK Provinsi Aceh akan mengembangkan kemitraan yang lebih luas dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, dan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan program serta mempercepat pemerataan kualitas guru di seluruh wilayah Aceh, termasuk daerah terpencil dan kepulauan. Dengan dukungan kolaboratif dan pemanfaatan data yang lebih baik, BGTK Provinsi Aceh optimis dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun sumber daya manusia pendidikan yang unggul menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi BGTK Provinsi Aceh

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh wajib memastikan bahwa arah kebijakan dan perencanaan strategisnya sejalan dengan visi pembangunan pendidikan nasional. Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2025-2029, yaitu:

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045,”

menjadi landasan utama dalam perumusan arah pengembangan guru dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah Aceh.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kemendikdasmen 2025-2029 serta berlandaskan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025, maka BGTK Provinsi Aceh merumuskan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya guru dan tenaga kependidikan Provinsi Aceh yang kompeten, berintegritas, adaptif, dan berdaya saing global untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, serta berkeadilan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Visi ini mencerminkan komitmen BGTK Provinsi Aceh untuk membangun sumber daya manusia pendidikan yang tidak hanya menguasai kompetensi profesional, tetapi juga memiliki karakter kuat, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, pemanfaatan teknologi, serta kesiapan bersaing di tingkat nasional dan global. Dengan guru dan tenaga kependidikan yang unggul dan berintegritas, Aceh diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, menghargai keberagaman, dan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh warga pendidikan.

Melalui visi tersebut, seluruh kebijakan, program, dan kegiatan BGTK Provinsi Aceh diarahkan untuk memperkuat transformasi pendidikan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas GTK secara holistik, serta berkontribusi strategis dalam pencapaian target pembangunan pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, BGTK Provinsi Aceh hadir sebagai pusat rujukan dan mitra strategis dalam upaya peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan di seluruh daerah Aceh.

Ke depan, BGTK Provinsi Aceh akan terus membangun ekosistem pembelajaran yang dinamis dan adaptif, serta mendorong terciptanya budaya inovasi di lingkungan satuan pendidikan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pendekatan berbasis data, dan penguatan jejaring kolaborasi multipihak, BGTK Aceh bertekad memperluas jangkauan layanan dan memastikan setiap guru serta tenaga kependidikan memperoleh peluang pengembangan kompetensi yang relevan dan inklusif. Dengan komitmen tersebut, BGTK Provinsi Aceh diharapkan semakin mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pendidikan Aceh yang unggul, modern, dan berkarakter.

Gambar 2. 1 Proses Cascading (penjabaran) Visi BGTK Provinsi Aceh Tahun 2025-2029



B. Misi BGTK Provinsi Aceh

Dalam rangka mewujudkan visi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh, diperlukan arah strategis yang jelas melalui perumusan misi kelembagaan. Penyusunan misi ini tetap mengacu pada keselarasan dengan Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Misi



Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Misi Kemendikdasmen menekankan pentingnya penyediaan layanan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan zaman, didukung oleh sarana prasarana memadai, pembelajaran berkualitas, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran. Sejalan dengan itu, Ditjen GTKPG memperkuat peran strategis guru dan tenaga kependidikan sebagai aktor utama peningkatan mutu pendidikan nasional melalui pengembangan kompetensi yang sistematis dan berkelanjutan.

Berangkat dari landasan tersebut, serta merujuk pada ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025 mengenai tugas dan fungsi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, BGTK Provinsi Aceh kemudian merumuskan misi kelembagaannya untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan di Provinsi Aceh.
2. Mengembangkan model peningkatan kompetensi yang relevan dan inovatif bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Mengembangkan media dan perangkat pembelajaran untuk mendukung kualitas proses belajar-mengajar.
4. Menyelenggarakan program peningkatan kompetensi secara berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.
5. Memfasilitasi berbagai bentuk layanan peningkatan kompetensi melalui pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi.
6. Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan program pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi seluruh program pengembangan dan pemberdayaan GTK.
8. Membangun dan memperluas kemitraan strategis dalam mendukung peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.
9. Menyelenggarakan layanan administrasi dan tata kelola BGTK Aceh secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Misi ini menjadi dasar operasional bagi BGTK Provinsi Aceh dalam mengemban

perannya sebagai UPT pengembangan dan pemberdayaan guru serta tenaga kependidikan. Melalui pelaksanaan misi tersebut, BGTK Aceh berkomitmen mendukung terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan inklusif di Provinsi Aceh, serta memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Gambar 2. 2 Proses Cascading (penjabaran) Misi BGTK Provinsi Aceh Tahun 2025-2029



C. Tujuan BGTK Provinsi Aceh

Perumusan tujuan BGTK Provinsi Aceh disusun dengan merujuk pada tujuan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) Kemendikdasmen sebagai acuan utama dalam menggambarkan keberhasilan pelaksanaan misi serta pencapaian visi kelembagaan. Tujuan strategis tersebut menjadi dasar pengukuran capaian kinerja BGTK Provinsi Aceh dalam periode perencanaan.

Adapun tujuan strategis beserta indikator kinerja yang ditetapkan oleh BGTK Provinsi Aceh disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rumusan Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja BGTK Provinsi Aceh

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja
1	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran
2	Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Aceh minimal sangat baik 2. Predikat AKIP Balai GTK Provinsi Aceh minimal A.

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Kemendikdasmen serta untuk memastikan keterhubungan (cascading) kinerja yang selaras mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja eselon I, hingga unit pelaksana teknis (UPT) eselon III, maka perumusan tujuan BGTK Provinsi Aceh disusun dengan mengacu pada Tujuan dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Penjabaran ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi BGTK Provinsi Aceh sehingga tujuan yang dirumuskan dapat menggambarkan kontribusi nyata UPT dalam mendukung pencapaian sasaran strategis di tingkat nasional.

Gambar 2. 3 Proses Cascading (penjabaran) Tujuan BGTK Provinsi Aceh





Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.3, tujuan BGTK Provinsi Aceh merupakan hasil penjabaran (cascading) secara sistematis dari tingkat kementerian hingga Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG). Kemendikdasmen merumuskan lima tujuan strategis yang menjadi arah utama pembangunan pendidikan nasional. Dari kelima tujuan tersebut, Ditjen GTKPG berperan langsung dalam pencapaian dua tujuan, yaitu menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan, serta menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Ditjen GTKPG, BGTK Provinsi Aceh memiliki kontribusi strategis dalam mewujudkan peningkatan mutu layanan pendidikan melalui penguatan kapasitas dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan di seluruh Aceh. Pencapaian mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pendidik; oleh karena itu, fokus utama BGTK Aceh adalah memastikan bahwa guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi yang memadai, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menerapkan inovasi pembelajaran di satuan pendidikan. Peningkatan profesionalisme GTK ini akan berdampak langsung pada kualitas implementasi kurikulum, pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik, kemampuan merancang pembelajaran yang responsif, serta peningkatan kualitas asesmen yang lebih berorientasi pada perkembangan peserta didik. Pada saat yang sama, peningkatan kompetensi GTK Aceh juga diharapkan mampu mengatasi tantangan terkait persebaran guru yang belum merata dan kesenjangan kualitas antarwilayah di Aceh.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tujuan Kemendikdasmen mengenai penguatan sistem tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, BGTK Provinsi Aceh berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Salah satu area penting dalam Reformasi Birokrasi adalah penguatan akuntabilitas kinerja, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan BGTK Aceh dilaksanakan secara efektif, efisien, berdampak, serta dapat dipertanggungjawabkan.



Melalui tata kelola yang kuat dan profesional, BGTK Aceh dapat menghasilkan layanan publik yang prima, kredibel, dan berkelanjutan.

Kedua tujuan strategis tersebut telah selaras dengan tugas dan fungsi BGTK Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa BGTK Aceh memiliki tugas utama melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan (Pasal 5), serta fungsi pelaksanaan urusan administrasi kelembagaan (Pasal 6). Dengan demikian, rumusan tujuan BGTK Provinsi Aceh tidak hanya mencerminkan mandat kelembagaan, tetapi juga menggambarkan kontribusi nyata UPT dalam mendukung transformasi pendidikan Aceh menuju layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan sebagai bagian dari agenda besar Indonesia Emas 2045.

D. Sasaran Kinerja/Kegiatan BGTK Provinsi Aceh

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata sebagai hasil dari pelaksanaan satu atau beberapa program. Pada tingkat Kementerian, sasaran dirumuskan sebagai Sasaran Strategis; pada tingkat Eselon I ditetapkan sebagai Sasaran Program; sedangkan pada level Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau satuan kerja dirumuskan sebagai Sasaran Kegiatan.

Dalam konteks BGTK Provinsi Aceh, Sasaran Kegiatan (SK) disusun untuk menggambarkan kontribusi langsung satuan kerja terhadap pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, serta mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kemendikdasmen.

Adapun Sasaran Kegiatan BGTK Provinsi Aceh terdiri atas adalah [SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan, yang mencerminkan upaya peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme pendidik di seluruh jenjang; dan [SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Aceh, sebagai wujud penguatan manajemen kelembagaan, akuntabilitas kinerja, serta penyelenggaraan layanan publik yang efektif dan berkualitas.

Kedua sasaran tersebut menjadi landasan operasional bagi BGTK Provinsi Aceh dalam melaksanakan program kerja selama periode 2025-2029, sehingga kontribusi

UPT terhadap peningkatan mutu pendidikan di Aceh dapat terukur, konsisten, dan selaras dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional.

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran Kinerja/Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BGTK Provinsi Aceh

No	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1	Menguatnya mutu layanan pendidikan pada seluruh jenjang melalui peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Aceh.	[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran
2	Menguatnya tata kelola program pengembangan dan pemberdayaan guru serta tenaga kependidikan yang partisipatif, transparan, efektif, dan akuntabel	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Aceh	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Aceh minimal sangat baik [IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Aceh minimal A

Dari rumusan tujuan sebagaimana diuraikan pada Bab II sub-bab C, diperoleh 2 (dua) Sasaran Kinerja/Kegiatan [SK] yaitu [SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan [IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran, dan [SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Aceh dengan [IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Aceh minimal sangat baik, dan [IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Aceh minimal A.

Target Kinerja Periode Renstra 2025-2029

Untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan hingga tahun 2029, diperlukan tahapan capaian yang lebih operasional melalui perumusan sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini berfungsi sebagai penjabaran tahunan yang menggambarkan progres pencapaian tujuan strategis secara bertahap dan terukur.

Setiap sasaran kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang berperan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana capaian yang direncanakan telah direalisasikan dari tahun ke tahun. Indikator kinerja tersebut menjadi dasar evaluasi efektivitas program serta memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan BGTK Provinsi Aceh tetap berada dalam koridor pencapaian tujuan strategis lembaga.

Berikut disajikan dua sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya yang telah diturunkan dari tujuan strategis BGTK Provinsi Aceh, sebagai landasan penyelenggaraan program dan kegiatan pada periode perencanaan.

Tabel 2. 3 Target Kinerja Periode Renstra 2025 - 2029

Program		Target				
138.03.DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran						
Kegiatan						
7614 - Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
Sasaran Kegiatan (SK)		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan						
IKK 1.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1.44 %	3.13 %	4.93 %	6.92 %	9.1 %
Program		Target				
138.03.WA - Program Dukungan Manajemen						
Kegiatan						
7619 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GTKPG						
Sasaran Kegiatan (SK)		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Aceh						
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Aceh minimal sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Aceh minimal A	A	A	A	A	A



Berdasarkan Tabel 2.3, pada tahun 2025 BGTK Provinsi Aceh menargetkan persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh fasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran mencapai 1,44% dari total sasaran layanan. Target ini merupakan langkah awal dalam memperluas jangkauan layanan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara bertahap dan terukur hingga tahun 2029.

Dari aspek tata kelola, BGTK Provinsi Aceh menetapkan target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) berada pada kategori "Sangat Baik", serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai predikat "A". Target tersebut menggambarkan komitmen satuan kerja dalam mewujudkan tata kelola yang profesional, transparan, efektif, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*.

Seluruh target kinerja tahunan tersebut disusun dengan merujuk pada matriks kinerja Eselon I Ditjen GTK-PG, sehingga capaian BGTK Provinsi Aceh dapat selaras dengan arah kebijakan dan indikator kinerja yang ditetapkan pada tingkat kementerian. Dengan demikian, target ini menjadi pedoman penting bagi BGTK Provinsi Aceh dalam memastikan konsistensi implementasi program serta kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di Aceh.

Penerapan Kriteria SMART

Perumusan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang digunakan oleh BGTK Provinsi Aceh telah disusun berdasarkan prinsip SMART, yaitu prinsip yang memastikan bahwa setiap indikator dapat berfungsi secara efektif sebagai alat ukur kinerja. Penerapan prinsip tersebut memastikan bahwa indikator yang ditetapkan bersifat jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu yang spesifik.

Dalam aspek specific, setiap IKK dirancang dengan tujuan yang terdefinisi secara jelas, tidak bersifat normatif, dan tidak menimbulkan makna ganda. Indikator tersebut menggambarkan secara langsung hasil yang ingin dicapai serta berhubungan erat dengan ruang lingkup tugas BGTK Provinsi Aceh. Selanjutnya, prinsip measurable dipenuhi melalui penggunaan ukuran kuantitatif, baik berupa jumlah maupun persentase, sehingga memudahkan proses pengukuran dan evaluasi kinerja secara objektif.

Dari sisi achievable, indikator ditetapkan dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta mandat yang dimiliki BGTK Provinsi Aceh, sehingga target yang ditetapkan realistis untuk dicapai dalam periode perencanaan. Prinsip relevant terlihat dari keterkaitan indikator terhadap visi, misi, tujuan strategis, sasaran kegiatan, serta Perjanjian Kinerja, sehingga setiap indikator berkontribusi langsung terhadap pencapaian arah kebijakan yang telah ditetapkan. Terakhir, prinsip time bound memastikan bahwa setiap indikator memiliki rentang waktu pencapaian yang jelas, sehingga mempermudah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi secara berkala.

Dengan penerapan prinsip SMART ini, indikator kinerja yang digunakan BGTK Provinsi Aceh mampu berfungsi sebagai alat ukur yang efektif dan kredibel dalam memantau perkembangan kinerja lembaga. Uraian berikut menyajikan bukti penerapan prinsip SMART pada masing-masing IKK yang telah ditetapkan :

Tabel 2. 4 Penerapan Kriteria SMART pada IKK BGTK Provinsi Aceh

IKK	Uraian IKK	Kriteria SMART				
		Spesific	Measureable	Achievable	Relevant	Time-Bound
1.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Tujuan IKK 1.1 jelas, sebagaimana dijabarkan pada penjelasan Tabel 2.3	Memiliki target dalam bentuk angka pada tahun 2025	IKK 1.1 dapat dijangkau dengan sumber daya yang dimiliki	IKK 1.1 sesuai dengan tugas-fungsi dan Perjanjian Kinerja	Waktu pencapaian IKK 1.1 jelas setiap tahun sebagaimana Tabel 2.3
2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Aceh minimal sangat baik	Tujuan IKK 2.1 jelas, sebagaimana dijabarkan pada penjelasan Tabel 2.3	Memiliki target dalam bentuk angka pada tahun 2025	IKK 2.1 dapat dijangkau dengan sumber daya yang dimiliki	IKK 2.1 sesuai dengan tugas-fungsi dan Perjanjian Kinerja	Waktu pencapaian IKK 2.1 jelas setiap tahun sebagaimana Tabel 2.3
2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Aceh minimal A	Tujuan IKK 2.2 jelas, sebagaimana dijabarkan pada penjelasan Tabel 2.3	Memiliki target dalam bentuk predikat pada tahun 2025	IKK 2.2 dapat dijangkau dengan sumber daya yang dimiliki	IKK 2.2 sesuai dengan tugas-fungsi dan Perjanjian Kinerja	Waktu pencapaian IKK 2.2 jelas setiap tahun sebagaimana Tabel 2.3

Berdasarkan Tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa BGTK Provinsi Aceh telah menerapkan prinsip SMART secara konsisten dalam proses perumusan dan penjabaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penerapan prinsip tersebut memastikan bahwa setiap

target kinerja disusun secara jelas dan terarah, memiliki ukuran pencapaian yang dapat dihitung secara objektif, serta realistis untuk direalisasikan oleh satuan kerja sesuai kapasitas dan kewenangannya.

Selain itu, indikator yang dirumuskan telah menunjukkan relevansinya dengan tugas dan fungsi BGTK Provinsi Aceh, sehingga seluruh target yang ditetapkan benar-benar mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan tujuan strategis lembaga. Setiap indikator juga dilengkapi dengan batasan waktu yang jelas, sehingga pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara terstruktur sepanjang periode perencanaan.

Dengan demikian, target kinerja BGTK Provinsi Aceh tidak hanya tersusun secara sistematis, tetapi juga mencerminkan komitmen lembaga untuk menerapkan tata kelola kinerja yang profesional, terukur, dan akuntabel.

Indikasi Risiko

Berdasarkan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, BGTK Provinsi Aceh melakukan identifikasi awal terhadap berbagai indikasi risiko yang berpotensi muncul dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Identifikasi risiko ini penting untuk memastikan bahwa setiap potensi hambatan dapat diantisipasi sejak dini sehingga tidak mengganggu pencapaian sasaran kegiatan maupun target kinerja lembaga.

Risiko-risiko tersebut dipetakan berdasarkan keterkaitannya dengan masing-masing sasaran kegiatan, sehingga dapat terlihat dengan jelas aspek-aspek mana yang memerlukan perhatian khusus, mitigasi, dan pengendalian yang lebih intensif. Dengan demikian, BGTK Provinsi Aceh dapat meminimalkan potensi ketidaktercapaian sasaran sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung peningkatan pengembangan dan pemberdayaan guru serta tata kelola kelembagaan.

Adapun indikasi risiko yang teridentifikasi berdasarkan Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Indikasi Risiko pada Sasaran Kegiatan BGTK Provinsi Aceh

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko
1	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan	1. Rendahnya partisipasi dan komitmen sebagian guru serta tenaga kependidikan dalam mengikuti program pengembangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko
	tenaga kependidikan	kompetensi, yang dapat berdampak pada tidak optimalnya pencapaian sasaran peningkatan profesionalisme GTK.
		2. Akses pelatihan yang belum merata di seluruh wilayah Provinsi Aceh, baik akibat faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, maupun jangkauan program yang masih terbatas, sehingga menghambat pemerataan layanan pengembangan kompetensi
		3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya pendukung yang berpotensi mempengaruhi efektivitas implementasi program, terutama kegiatan yang membutuhkan sarana, teknologi, dan dukungan operasional yang memadai.
		4. Keterbatasan jumlah serta variasi kompetensi fasilitator atau narasumber, yang dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan pelatihan, pendampingan, maupun kegiatan peningkatan kompetensi lainnya.
		5. Perubahan kebijakan pusat yang cepat dan dinamis, yang dapat mempengaruhi kesesuaian rencana program dan kegiatan sehingga memerlukan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BGTK Provinsi Aceh dalam menyesuaikan implementasi di lapangan.
2	Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Aceh	1. Perencanaan program dan anggaran yang tidak sepenuhnya selaras dengan prioritas Ditjen GTK maupun kebutuhan daerah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan fokus program dan berpengaruh pada efektivitas pencapaian sasaran kegiatan.
		2. Ketidaktepatan waktu pelaksanaan serta tidak tercapainya output kegiatan sesuai target, yang dapat disebabkan oleh kendala teknis, keterbatasan kapasitas pelaksana, maupun situasi eksternal yang tidak terduga.
		3. Keterlambatan dalam proses administrasi, perubahan kebijakan yang mendadak, serta keterbatasan jumlah SDM pelaksana, yang dapat menghambat kelancaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko
		implementasi kegiatan dan menurunkan kualitas pelayanan.
		4. Pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya berbasis data, sehingga keputusan strategis atau operasional yang dihasilkan berisiko kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
		5. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum lengkap atau belum diterapkan secara konsisten, yang berdampak pada ketidakteraturan proses kerja dan potensi terjadinya inkonsistensi kualitas layanan.
		6. Mekanisme monitoring dan evaluasi internal yang belum berjalan secara optimal, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, penyelesaian masalah, serta tindak lanjut rekomendasi belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kinerja.

Untuk mengantisipasi berbagai indikasi risiko yang dapat memengaruhi pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, BGTK Provinsi Aceh perlu melakukan langkah-langkah pengelolaan risiko yang sistematis dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi:

1. Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif, terutama risiko yang berkaitan dengan rendahnya motivasi dan partisipasi guru, keterbatasan sumber daya, tantangan geografis, atau ketidaksesuaian program pelatihan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Proses identifikasi ini menjadi dasar penting untuk memahami potensi hambatan yang dapat mengganggu pencapaian sasaran peningkatan kompetensi.
2. Mengembangkan strategi mitigasi yang terencana dan terukur, melalui penyusunan langkah-langkah pengendalian risiko yang efektif. Strategi tersebut dapat mencakup penguatan motivasi guru melalui mekanisme insentif, pengakuan atas kinerja, peningkatan komunikasi dan sosialisasi program, penyediaan sumber daya yang memadai, serta peningkatan efektivitas program melalui pendampingan dan monitoring berkala.

3. Meningkatkan kualitas program peningkatan kompetensi dengan memastikan bahwa seluruh pelatihan, bimtek, workshop, maupun pendampingan disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang akurat. Program harus relevan dengan tuntutan kurikulum, perkembangan teknologi, dan kebutuhan satuan pendidikan, serta mengacu pada standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk memperluas jangkauan layanan peningkatan kompetensi di seluruh wilayah Aceh. Pemanfaatan platform digital, LMS, webinar, serta aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan fleksibilitas pelatihan, terutama bagi guru yang berada di wilayah terpencil.
5. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang kuat, untuk memastikan setiap program peningkatan kompetensi berjalan sesuai rencana. Melalui monev yang berkelanjutan, BGTK Provinsi Aceh dapat menilai efektivitas program, mengidentifikasi kendala lapangan, serta melakukan penyesuaian dan perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan data aktual.

Melalui penerapan langkah-langkah pengelolaan risiko yang terstruktur ini, BGTK Provinsi Aceh diharapkan mampu meminimalkan potensi hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan program peningkatan kompetensi. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Aceh.

Untuk mengantisipasi berbagai indikasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran peningkatan tata kelola Balai GTK Provinsi Aceh, diperlukan langkah-langkah pengelolaan risiko yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Risiko-risiko yang telah teridentifikasi memerlukan strategi mitigasi yang tepat agar tidak berdampak pada kualitas manajemen kelembagaan maupun pada efektivitas layanan publik. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan keselarasan perencanaan program dan anggaran dengan prioritas Ditjen GTK serta kebutuhan riil daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi yang lebih intensif, pemanfaatan data perencanaan, dan penyesuaian program secara berkala agar seluruh kegiatan memiliki relevansi dan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran.

- 
2. Memperkuat manajemen waktu dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, termasuk penerapan timeline yang realistis, pengawasan progres secara berkala, dan penguatan kapasitas pelaksana untuk meminimalkan risiko keterlambatan atau tidak tercapainya output sesuai target.
 3. Meningkatkan efisiensi proses administrasi serta adaptasi terhadap perubahan kebijakan, dengan menyederhanakan alur administrasi, memperbaiki manajemen dokumen, serta memastikan kecukupan SDM pelaksana. Upaya ini juga mencakup peningkatan kemampuan pegawai dalam memahami regulasi terbaru.
 4. Mendorong pengambilan keputusan berbasis data, melalui pemanfaatan sistem informasi, penguatan pengumpulan data lapangan, serta peningkatan kualitas analisis data agar keputusan strategis dan operasional semakin akurat dan sesuai kebutuhan organisasi.
 5. Menyempurnakan dan memastikan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh unit kerja. Penyusunan SOP yang lengkap, mudah dipahami, serta pengawasan implementasinya akan membantu menciptakan proses kerja yang lebih teratur dan standar kualitas layanan yang lebih konsisten.
 6. Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi internal, baik melalui evaluasi rutin, supervisi berjenjang, maupun sistem pelaporan yang responsif. Dengan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, permasalahan dapat diidentifikasi lebih cepat dan ditindaklanjuti secara tepat guna meningkatkan kinerja kelembagaan.

Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi tersebut, BGTK Provinsi Aceh diharapkan dapat memperkuat tata kelola internal, meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa seluruh proses manajerial berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen

Penyusunan Rencana Strategis Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan pendidikan nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kedua dokumen tersebut menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan, program, dan sasaran BGTK Provinsi Aceh agar selaras dengan agenda pembangunan pendidikan nasional dan mampu memberikan kontribusi nyata pada peningkatan mutu guru serta tenaga kependidikan di Aceh.

Arah kebijakan Kemendikdasmen memberikan pijakan bagi BGTK Provinsi Aceh dalam menyusun strategi yang komprehensif dan operasional, khususnya dalam mendukung perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta perbaikan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. Dengan mengacu pada kebijakan tersebut, BGTK Provinsi Aceh memastikan bahwa seluruh perencanaan dan implementasi program selama lima tahun ke depan memiliki relevansi kuat terhadap kebutuhan pembangunan pendidikan nasional maupun kebutuhan daerah.

Berikut disajikan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjadi dasar penyusunan Renstra BGTK Provinsi Aceh :

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a. Peningkatan kualitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk pemenuhan kebutuhan, distribusi dan redistribusi berdasarkan pemetaan komprehensif; penataan jenjang karir; pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru; program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus. b. Mendorong pengembangan kurikulum

Arah Kebijakan	Strategi
	pembelajaran guru yang mencakup literasi, numerasi, sains dan teknologi; pembelajaran mendalam; coding; kecerdasan buatan; pendidikan karakter; dan kesehatan sekolah. c. Penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru S1/D- IV. d. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) dan pendekatan pelatihan berbasis pembelajaran mendalam. e. Peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah untuk mendorong perbaikan kualitas belajar mengajar dan satuan pendidikan. f. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. g. Penyediaan guru dan tenaga pendidik untuk mendukung program Sekolah Rakyat.
Transformasi digital dan tata kelola pendidikan berbasis data (SPBE)	a. Pengembangan dan pemanfaatan sistem data guru dan tenaga kependidikan berbasis elektronik. b. Peningkatan layanan pengembangan kompetensi melalui platform digital dan blended learning. c. Optimalisasi tata kelola internal dan penguatan mekanisme akuntabilitas berbasis data.
Peningkatan mutu proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam	a. Implementasi model pembelajaran mendalam (deep learning) dalam program pelatihan fasilitator, pendidik dan tenaga kependidikan. b. Penguatan literasi, numerasi, sains, teknologi dan karakter dalam pelatihan guru. c. Pengembangan inovasi pedagogik untuk meningkatkan hasil belajar dan IKU sekolah.
Penguatan karakter peserta didik melalui implementasi 8 Dimensi Lulusan	a. Integrasi nilai karakter melalui pelatihan guru dan pengawas agar lulusannya memiliki profil sesuai dimensi lulusan nasional. b. Pengembangan modul dan kegiatan yang menanamkan integritas, kolaborasi, kreatifitas, dan kepemimpinan di sekolah.
Peningkatan efektivitas kelembagaan dan kolaborasi multipihak dalam ekosistem pendidikan	a. Penguatan kemitraan dengan dinas pendidikan kab/kota, perguruan tinggi, masyarakat.

Arah Kebijakan	Strategi
	b. Penataan organisasi dan tata kerja agar responsif terhadap kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam merespon tantangan pendidikan seperti ketimpangan antar wilayah dan literasi digital rendah. Demikian juga ketimpangan terkait SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak merata.

Konteks pembangunan pendidikan nasional pada periode ini menempatkan penguatan sumber daya manusia pendidikan sebagai prioritas utama. Transformasi pendidikan diarahkan pada terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas, berkeadilan, adaptif terhadap perubahan, dan berkelanjutan, dengan fokus pada:

1. Penguatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).
2. Transformasi digital dan tata kelola pendidikan berbasis data (SPBE).
3. Peningkatan mutu proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam.
4. Penguatan karakter peserta didik melalui implementasi 8 Dimensi Lulusan.
5. Peningkatan efektivitas kelembagaan dan kolaborasi multipihak dalam ekosistem pendidikan.

Tantangan khusus yang dihadapi Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem nasional antara lain:

1. Ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah (terutama antara Pulau Simeulue, Pulau Aceh, Pulau Banyak, Pulau Sabang).
2. Keterbatasan akses dan partisipasi guru dalam program pengembangan profesional berkelanjutan.
3. Rendahnya literasi digital dan inovasi pedagogik sebagian guru di wilayah terpencil.
4. Kebutuhan penguatan kelembagaan UPT di daerah agar lebih responsif terhadap perubahan kebijakan nasional.

Dengan latar belakang tersebut, BGTK Provinsi Aceh berperan strategis sebagai pelaksana teknis bidang pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di wilayah provinsi, serta menjadi penghubung kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal

pendidikan di daerah.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BGTK Provinsi Aceh

Dalam menyusun rencana strategis BGTK Provinsi Aceh tahun 2025-2029, perlu mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi yang sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029, beberapa arah kebijakan dan strategi yang relevan dengan BGTK Provinsi Aceh adalah :

Tabel 3. 2 Arah Kebijakan dan Strategi BGTK Provinsi Aceh

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a. Peningkatan kualitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk pemenuhan kebutuhan, distribusi dan redistribusi berdasarkan pemetaan komprehensif; penataan jenjang karir; pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru; program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus. b. Mendorong pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup literasi, numerasi, sains dan teknologi; pembelajaran mendalam; coding; kecerdasan buatan; pendidikan karakter; dan kesehatan sekolah. c. Penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru S1/D-IV. d. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) dan pendekatan pelatihan berbasis pembelajaran mendalam. e. Peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah untuk mendorong perbaikan kualitas belajar mengajar dan satuan

Arah Kebijakan	Strategi
	pendidikan.
Transformasi digital dan tata kelola pendidikan berbasis data (SPBE)	a. Pengembangan dan pemanfaatan sistem data guru dan tenaga kependidikan berbasis elektronik. b. Peningkatan layanan pengembangan kompetensi melalui platform digital dan blended learning. c. Optimalisasi tata kelola internal dan penguatan mekanisme akuntabilitas berbasis data.
Peningkatan mutu proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam	a. Implementasi model pembelajaran mendalam (deep learning) dalam program pelatihan fasilitator, pendidik dan tenaga kependidikan. b. Penguatan literasi, numerasi, sains, teknologi dan karakter dalam pelatihan guru. c. Pengembangan inovasi pedagogik untuk meningkatkan hasil belajar dan IKU sekolah.
Penguatan karakter peserta didik melalui implementasi 8 Dimensi Lulusan	a. Integrasi nilai karakter melalui pelatihan guru dan pengawas agar lulusannya memiliki profil sesuai dimensi lulusan nasional. b. Pengembangan modul dan kegiatan yang menanamkan integritas, kolaborasi, kreatifitas, dan kepemimpinan di sekolah.
Peningkatan efektivitas kelembagaan dan kolaborasi multipihak dalam ekosistem pendidikan	a. Penguatan kemitraan dengan dinas pendidikan kab/kota, perguruan tinggi, masyarakat. b. Penataan organisasi dan tata kerja agar responsif terhadap kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam merespon tantangan pendidikan seperti ketimpangan antar wilayah dan literasi digital rendah. Demikian juga ketimpangan terkait SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak merata.

C. Kerangka Regulasi BGTK Provinsi Aceh

Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh menetapkan sejumlah regulasi sebagai dasar



penyusunan serta pelaksanaan program. Seluruh kegiatan kelembagaan berpedoman pada kerangka regulasi nasional maupun daerah yang menjadi landasan hukum, acuan kebijakan, sekaligus pedoman operasional dalam menjalankan tugas dan fungsi BGTK.

Kerangka regulasi tersebut mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan teknis, dan kebijakan strategis yang relevan dengan pengembangan dan pemberdayaan pendidik serta tenaga kependidikan, penguatan transformasi digital dalam pembelajaran, serta peningkatan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Dengan berlandaskan regulasi yang komprehensif dan mutakhir, BGTK Provinsi Aceh memastikan setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dapat berjalan konsisten, terarah, dan sesuai standar nasional pendidikan.

Regulasi Nasional

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Menjadi dasar utama bagi seluruh penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk fungsi pembinaan dan peningkatan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan. UU ini mengamanatkan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen : Mengatur hak, kewajiban, kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, serta pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru dan dosen. BGTK mengacu pada UU ini dalam merancang program pelatihan, pengembangan karier, dan peningkatan kompetensi guru serta tenaga kependidikan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya) : Mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam konteks ini, BGTK Provinsi Aceh menjalankan fungsi dekonsentrasi di bidang pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai kepanjangan tangan dari kebijakan pusat.
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang relevan dengan RPJMN 2025-2029 : Menjadi acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dalam

menyusun rencana strategis lima tahunan. Fokus utama pada sektor pendidikan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses, dan transformasi digital pendidikan menuju “Indonesia Emas 2045”.

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) : Mengatur penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis digital, termasuk integrasi layanan, interoperabilitas data, dan peningkatan efisiensi birokrasi. Dalam konteks BGTK, regulasi ini menjadi dasar pengembangan sistem informasi pembelajaran, pelaporan, dan manajemen program berbasis data digital.
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 460/M/2024 tentang Peta Rencana SPBE Kemendikbudristek. Dokumen ini menegaskan arah transformasi digital Kemendikbudristek, termasuk penguatan data pendidikan, layanan berbasis platform digital, serta integrasi sistem dalam ekosistem SPBE pendidikan. BGTK Aceh menindaklanjuti keputusan ini melalui penguatan tata kelola data pelatihan, registrasi peserta, evaluasi berbasis Learning Management System (LMS), dan pengelolaan data PTK secara daring.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Menjadi dasar hukum bagi keberadaan, fungsi, dan peran BGTK di tingkat provinsi, termasuk BGTK Provinsi Aceh, dalam melaksanakan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan secara berjenjang dan berkelanjutan.
8. Rencana Strategis (Renstra) Kemendikdasmen 2025-2029. Sebagai dokumen induk arah kebijakan, strategi, sasaran, dan indikator kinerja bidang pendidikan dasar dan menengah. Renstra ini menekankan:
 - a) Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
 - b) Transformasi digital pembelajaran.
 - c) Penguatan karakter peserta didik.
 - d) Efisiensi tata kelola dan kolaborasi multipihak. Dokumen inilah yang menjadi acuan langsung dalam penyusunan Renstra BGTK Provinsi Aceh.

Regulasi dan Kebijakan Daerah

Untuk memastikan pelaksanaan arah kebijakan dan strategi secara optimal, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh berpedoman pada berbagai regulasi nasional dan daerah yang menjadi dasar hukum dan acuan operasional. Kerangka regulasi daerah yang relevan dan selaras dengan kebutuhan pengembangan guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Aceh antara lain:

1. Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tahun 2025-2029, yang saat ini dalam proses penetapan. Dokumen ini akan memuat arah pembangunan Aceh lima tahun ke depan, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan berkeadilan. Renstra BGTK Aceh diselaraskan dengan prioritas daerah, khususnya terkait peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, yang menjadi rujukan penting dalam mendukung peningkatan kualifikasi dan profesionalisme ASN, termasuk guru dan tenaga kependidikan. Pergub ini menjadi dasar bagi BGTK Aceh dalam menyinergikan program pengembangan kompetensi GTK dengan arah kebijakan peningkatan kapasitas aparatur di tingkat provinsi.
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, beserta pedoman pelaksanaannya. Regulasi ini menegaskan peran kelembagaan pendidikan di daerah, termasuk fungsi pelatihan, supervisi, dan pembinaan pendidikan berbasis teknologi. Pedoman ini menjadi acuan bagi BGTK Aceh dalam memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendukung layanan pembinaan GTK secara terstruktur.
4. Kebijakan Pemerintah Aceh mengenai Transformasi Digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini mendukung implementasi pengelolaan data pendidikan, administrasi pelatihan, serta pelaporan kinerja secara elektronik. BGTK Aceh menyesuaikan sistem layanan dan pengelolaan program agar terintegrasi dengan kebijakan digitalisasi pemerintah daerah.
5. Dokumen rencana tindakan atau kebijakan daerah lainnya yang mendukung

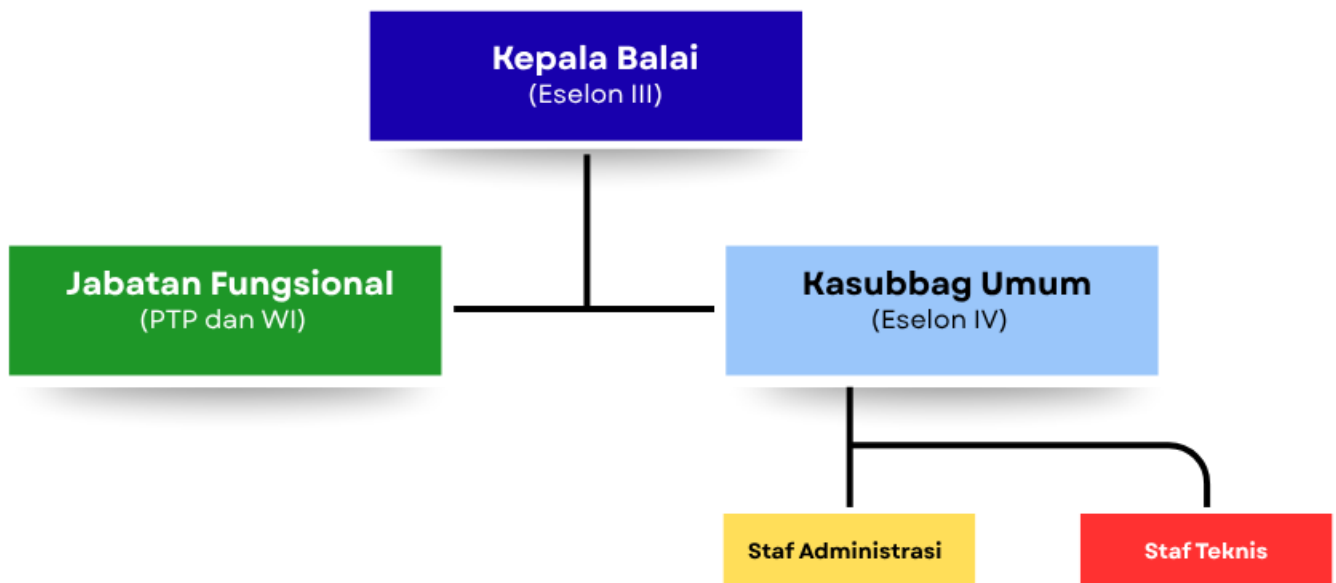
peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi guru, termasuk rencana aksi daerah (RAD) terkait mutu pendidikan apabila ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. Dokumen operasional tersebut menjadi acuan BGTK Aceh dalam mendukung percepatan peningkatan kompetensi GTK, terutama di wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.

D. Kerangka Kelembagaan BGTK Provinsi Aceh

Kerangka kelembagaan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh dibangun untuk memastikan tercapainya sasaran strategis sebagaimana termuat dalam Renstra Kemendikdasmen 2025-2029, terutama dalam bidang penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Struktur kelembagaan ini menempatkan BGTK Provinsi Aceh sebagai simpul koordinasi dan pelaksana teknis pengembangan sumber daya manusia pendidikan di wilayah provinsi.

Struktur Organisasi

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BGTK Provinsi Aceh





Struktur organisasi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. Struktur ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas pengembangan dan pemberdayaan guru serta tenaga kependidikan berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional. Susunan organisasi BGTK Provinsi Aceh meliputi:

1. Kepala Balai (Eselon III)

Memimpin dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas BGTK Provinsi Aceh, mulai dari penetapan kebijakan teknis, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi serta pelaporan kinerja. Kepala Balai menjadi penghubung strategis antara kebijakan nasional Kemendikdasmen dengan implementasinya di tingkat provinsi, sekaligus memastikan bahwa seluruh layanan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan berjalan sesuai standar mutu dan prinsip akuntabilitas.

2. Subbagian Umum (Kasubbag, Eselon IV)

Menyelenggarakan seluruh fungsi administrasi dan layanan internal meliputi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, serta layanan umum lainnya. Subbagian ini berperan penting dalam mendukung tata kelola lembaga melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan data, serta penyusunan laporan kinerja yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, Subbag Umum memastikan kelancaran pelayanan teknis dan operasional dalam setiap kegiatan BGTK.

3. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP)

Bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan pelatihan pendidik. PTP memproduksi berbagai media pembelajaran digital, konten multimedia, sistem pembelajaran daring, serta mengembangkan platform Learning Management System (LMS) BGTK Aceh. Peran ini menjadi kunci dalam mempercepat transformasi digital pendidikan dan meningkatkan akses serta kualitas pelatihan berbasis teknologi.

4. Jabatan Fungsional Widyaiswara (WI)

Menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan melalui bimtek, diklat, mentoring,

coaching, serta pendampingan profesional kepada guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya. Widyaiswara turut mengembangkan kurikulum, modul pelatihan, perangkat ajar, serta materi berbasis kompetensi seperti Pembelajaran Berdiferensiasi, Higher Order Thinking Skills (HOTS), dan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning). WI menjadi ujung tombak peningkatan kapasitas GTK secara substantif.

5. Staf Pelaksana Teknis dan Administratif

Memfasilitasi seluruh kegiatan teknis dan administratif BGTK Aceh, termasuk dokumentasi, publikasi, pengelolaan data, persiapan kegiatan, dukungan operasional, dan layanan informasi. Staf pelaksana memastikan bahwa setiap program dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan prosedur, baik dalam aspek teknis maupun administratif.

Hubungan Kerja Antar Unit

Untuk memastikan pelaksanaan program yang terintegrasi dan efektif, hubungan kerja antar unit di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh dibangun berdasarkan prinsip koordinasi, kolaborasi, dan keterpaduan kerja. Setiap unit di dalam organisasi memiliki peran spesifik yang saling melengkapi, sehingga diperlukan mekanisme kerja yang harmonis dan terstruktur agar seluruh tugas dan fungsi dapat dijalankan secara optimal.

Hubungan kerja antar unit dilakukan melalui mekanisme koordinasi rutin, rapat lintas unit, serta penyelarasan rencana kerja yang mengedepankan transparansi, kerja sama, dan saling mendukung. Model kerja ini memastikan bahwa setiap kegiatanmulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporandapat berjalan secara sinergis dan tidak berjalan secara parsial :

Tabel 3. 3 Hubungan Kerja Antar Unit BGTK Provinsi Aceh

Unit	Fungsi Utama	Koordinasi Internal dan Eksternal
Kepala Balai	Pengarah kebijakan, penjamin mutu program	Dinas Pendidikan Provinsi, Direktorat GTK, Pemda, Mitra Pembangunan
Kasubag Umum	Administrasi, keuangan, dan data SPBE	Sekretariat Ditjen GTK, Biro Umum, Dinas Provinsi

Unit	Fungsi Utama	Koordinasi Internal dan Eksternal
PTP	Inovasi teknologi pembelajaran, digitalisasi pelatihan	Pusdatin, Pusdiklat, sekolah mitra, perguruan tinggi
WI	Pelatihan dan pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan	BPMP, Dinas Pendidikan, organisasi profesi guru
Staf Pelaksana	Dukungan kegiatan operasional dan pelaporan	Semua unit internal BGTK

Mekanisme Tata Kelola Berbasis Data (SPBE)

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan layanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel, BGTK Provinsi Aceh mengembangkan tata kelola organisasi yang berorientasi pada data-driven management melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan mekanisme ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan, program, dan kebijakan yang dijalankan memiliki dasar informasi yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme tata kelola berbasis data tersebut diwujudkan melalui beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan SPBE dan SIMPKB untuk pemetaan kebutuhan guru secara komprehensif.

BGTK Provinsi Aceh memanfaatkan berbagai platform digital, termasuk SPBE dan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB), untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi guru dan tenaga kependidikan. Data mencakup persebaran guru per wilayah, jenjang pendidikan, status kepegawaian, latar belakang pendidikan, hingga tingkat kompetensi. Informasi ini menjadi dasar dalam merancang program pelatihan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.

2. Integrasi data pelatihan, validasi kompetensi, dan evaluasi kinerja melalui sistem pelaporan elektronik.

Seluruh aktivitas pelatihan dan pengembangan kompetensi guru didokumentasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan berbasis elektronik yang terhubung dengan Ditjen GTKPG dan Kemendikdasmen. Integrasi ini mempermudah proses pemantauan partisipasi, rekam jejak pelatihan individu, capaian pembelajaran, serta hasil evaluasi dampak pelatihan. Dengan demikian,

penyusunan kebijakan dapat dilakukan secara lebih terukur dan berbasis bukti (evidence-based policy).

3. Monitoring dan evaluasi berbasis dashboard digital.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, BGTK Provinsi Aceh mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi melalui dashboard digital yang menyajikan data real-time terkait capaian program, tingkat partisipasi guru, capaian indikator kinerja, serta perubahan perilaku mengajar pasca-pelatihan. Dashboard ini menjadi alat bantu strategis dalam menilai efektivitas program, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan tindak lanjut secara cepat dan tepat.

4. Penguatan keamanan, integritas, dan akuntabilitas data.

Dalam pengelolaan data GTK, BGTK Provinsi Aceh berkomitmen menerapkan prinsip transparansi, akurasi, dan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan perundang-undangan. Langkah-langkah pengamanan sistem, pengendalian akses, serta validasi data dilakukan secara berlapis untuk menjaga integritas informasi dan mencegah potensi penyalahgunaan. Dengan demikian, seluruh aktivitas tata kelola data dapat berjalan secara aman, andal, dan akuntabel.

Mekanisme Kolaborasi Multipihak

Dalam era desentralisasi pendidikan dan berkembangnya ekosistem pembelajaran yang menekankan kolaborasi lintas lembaga, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh memandang kemitraan multipihak sebagai strategi kunci untuk memperkuat pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan layanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan daerah serta selaras dengan kebijakan nasional. Adapun mekanisme kolaborasi multipihak tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

BGTK Provinsi Aceh menjalin koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui forum perencanaan bersama, rapat koordinasi, dan sinkronisasi program tahunan. Kerja sama ini meliputi pemetaan kebutuhan pelatihan guru, perencanaan redistribusi guru ASN dan non-ASN, penguatan data GTK, serta pelaksanaan program prioritas seperti



literasi, numerasi, dan pembelajaran digital. Kolaborasi ini memastikan kebijakan dan program pusat dapat diimplementasikan dengan efektif pada konteks daerah.

2. Perguruan Tinggi Mitra

Sebagai pusat pengembangan keilmuan dan sumber daya akademik, perguruan tinggi menjadi mitra strategis dalam pengembangan riset pendidikan, penyelenggaraan pelatihan berbasis micro-credential, serta pengembangan model pembelajaran inovatif. Kolaborasi dengan perguruan tinggi juga mencakup penyusunan modul pelatihan, pemberian pelatihan berbasis evidence-based, dan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan. Melalui kemitraan ini, BGTK Aceh memperkuat integrasi antara teori pendidikan dan praktik pembelajaran di lapangan.

3. Organisasi Profesi Guru (PGRI, IGI, dan asosiasi bidang studi)

Organisasi profesi sebagai wadah pengembangan diri guru memiliki peran penting dalam membangun jejaring komunitas belajar. BGTK Aceh bekerja sama dengan PGRI, IGI, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Asosiasi Kepala Sekolah, dan berbagai forum profesi lainnya untuk memperluas program pengembangan profesional, menggerakkan komunitas belajar guru, serta mendorong praktik pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif. Melalui kemitraan ini, budaya belajar sepanjang hayat di kalangan pendidik dapat diperkuat.

4. Mitra pembangunan dan lembaga donor

BGTK Provinsi Aceh membuka ruang kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti UNICEF, USAID, INOVASI, Tanoto Foundation, dan lembaga lainnya dalam rangka memperkuat intervensi afirmatif khususnya bagi guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Bentuk kemitraan meliputi penyediaan materi pelatihan, pendampingan sekolah, pengembangan model literasi-numerasi, serta penguatan tata kelola satuan pendidikan. Dukungan mitra internasional dan nasional ini memungkinkan BGTK Aceh memperluas cakupan layanan dan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di wilayah yang paling membutuhkan.

5. Platform EdTech lokal dan nasional

Transformasi digital pendidikan membutuhkan dukungan teknologi yang



memadai. Oleh karena itu, BGTK Aceh bekerja sama dengan platform EdTech, baik lokal maupun nasional, untuk menyediakan akses pelatihan digital, sumber belajar terbuka, *Learning Management System* (LMS), dan media pembelajaran interaktif. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pelatihan, tetapi juga mendukung peningkatan literasi digital guru serta pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif di sekolah.

Penegasan Peran BGTK Provinsi Aceh

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh memiliki posisi strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di tingkat daerah. Peran BGTK Aceh tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelatihan, tetapi mencakup fungsi-fungsi kunci yang menempatkannya sebagai simpul penting dalam ekosistem peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Adapun peran BGTK Provinsi Aceh diperkuat sebagai berikut:

1. Sebagai fasilitator pengembangan profesional berkelanjutan (Continuous Professional Development).

BGTK Aceh menjadi motor penggerak dalam memastikan guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan memperoleh layanan pengembangan kompetensi yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan. Melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, coaching, dan komunitas belajar, BGTK membantu mewujudkan tenaga pendidik yang kompeten, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan kurikulum, teknologi, dan kebutuhan peserta didik.

2. Sebagai pusat koordinasi data guru dan tenaga kependidikan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BGTK Aceh berperan penting dalam memastikan ketersediaan data GTK yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Basis data ini menjadi landasan utama dalam perencanaan kebijakan, analisis kebutuhan pelatihan, pemetaan distribusi guru, serta evaluasi kinerja secara berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui penguatan digitalisasi, BGTK mendukung implementasi SPBE di sektor



pendidikan Aceh.

3. Sebagai jembatan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, BGTK Aceh memastikan adanya sinkronisasi yang kuat antara kebijakan nasional terutama Renstra Kemendikdasmen dan arah kebijakan Ditjen GTKPG dengan kebutuhan lokal di Provinsi Aceh. BGTK berfungsi sebagai penghubung yang memastikan implementasi kebijakan pusat dapat diterjemahkan secara tepat, relevan, dan efektif di tingkat daerah.
4. Sebagai pusat inovasi pembelajaran bagi guru. BGTK Aceh mengembangkan berbagai model pembelajaran inovatif yang relevan dengan karakteristik daerah, termasuk pembelajaran mendalam (deep learning), pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan literasi dan numerasi berbasis konteks lokal Aceh. Peran ini mencakup pengembangan media pembelajaran, modul, serta perangkat ajar yang mendukung penerapan kurikulum yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan pemikiran kritis pada peserta didik.
5. Sebagai pusat layanan peningkatan kompetensi kepemimpinan sekolah. BGTK Aceh berperan dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan kepemimpinan calon kepala sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya. Melalui pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi kepemimpinan, BGTK membantu memperkuat kepemimpinan pembelajaran yang visioner, profesional, dan mampu menggerakkan ekosistem sekolah menuju budaya mutu.

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian menegaskan tekad untuk meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat integritas aparatur negara, serta mempercepat transformasi layanan pendidikan dasar dan menengah agar semakin berkualitas, inklusif, dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman.



Upaya reformasi ini tidak hanya berfokus pada penyederhanaan proses administrasi, tetapi juga menekankan transformasi budaya kerja, penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi teknologi informasi, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, birokrasi diharapkan bukan hanya menjadi mesin administratif, melainkan motor penggerak utama dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Bagi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh, implementasi reformasi birokrasi menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi yang profesional, akuntabel, responsif, dan berdaya saing. Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berperan langsung dalam pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, BGTK Aceh memikul tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses layanan mulai dari pemetaan kompetensi, pelatihan, pendampingan, hingga evaluasi dilaksanakan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di BGTK Aceh juga selaras dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), yang menekankan pentingnya penguatan sistem pembinaan guru dan tenaga kependidikan agar lebih adaptif, berbasis data, serta mampu meningkatkan profesionalisme SDM pendidikan di seluruh satuan pendidikan. Melalui reformasi birokrasi, BGTK Aceh diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai simpul strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh.

Dengan komitmen bersama untuk menjalankan reformasi secara menyeluruh baik pada aspek kelembagaan, sumber daya manusia, proses bisnis, maupun budaya kerja BGTK Provinsi Aceh optimis dapat membangun birokrasi modern yang memberikan layanan terbaik, terpercaya, serta berdampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Aceh.

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjadi pedoman utama bagi BGTK Provinsi Aceh dirumuskan untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, mendorong profesionalisme aparatur, serta meningkatkan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh. Adapun tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

BGTK Provinsi Aceh berkomitmen menanamkan budaya anti-KKN melalui



penguatan sistem pengendalian intern, pengawasan reguler, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset, serta pelaporan kinerja yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyimpangan dan memperkuat integritas kelembagaan.

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Reformasi dilakukan melalui penyederhanaan prosedur kerja, optimalisasi proses bisnis, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat arus layanan serta mengurangi beban administratif. Dengan penerapan sistem kerja berbasis kinerja (performance-based management), setiap program dan kegiatan dipastikan relevan, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi guru dan tenaga kependidikan.

3. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

BGTK Provinsi Aceh mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar dan menengah secara terarah, akuntabel, serta berkeadilan. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi prinsip utama untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan diterjemahkan secara tepat hingga ke tingkat sekolah dan masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pendidikan.

Reformasi birokrasi diarahkan untuk menjadikan layanan kepada guru dan tenaga kependidikan lebih cepat, sederhana, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan penerima layanan. Dengan peningkatan standar pelayanan dan pemanfaatan layanan digital, masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah dan berkualitas.

5. Mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, dan berorientasi pada kinerja.

Hal ini dilakukan melalui penataan manajemen SDM aparatur berdasarkan sistem merit, peningkatan kompetensi teknis dan manajerial pegawai, serta pembinaan etika dan integritas. Pegawai dituntut mampu bekerja adaptif, inovatif, dan memberikan kontribusi optimal sesuai perkembangan kebijakan pendidikan.

6. Memperkuat peran kelembagaan dan tata laksana organisasi.

Reformasi birokrasi juga bertujuan memperkuat kapasitas unit pelaksana teknis, termasuk BGTK Provinsi Aceh sebagai simpul strategis dalam



implementasi kebijakan peningkatan kompetensi GTK. Penguatan fungsi kelembagaan dilakukan melalui perbaikan proses bisnis, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan peningkatan kapasitas organisasi untuk menghasilkan layanan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Penguatan akuntabilitas dilakukan melalui penyelarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan pengawasan internal. Dengan demikian, seluruh program BGTK Provinsi Aceh dapat dipastikan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis Kemendikdasmen dan Ditjen GTKPG..

Untuk memastikan tercapainya tujuan strategis serta terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh menetapkan sejumlah langkah strategis yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang periode 2025-2029. Langkah-langkah ini dirancang untuk memperkuat kualitas layanan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta mendukung terwujudnya budaya kerja birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi hasil. Adapun langkah-langkah strategis tersebut meliputi:

1. Penguatan budaya kerja berintegritas dan berorientasi pelayanan

BGTK Provinsi Aceh akan memperkuat penerapan nilai dasar ASN BERAKHLAK sekaligus menginternalisasikan Core Values Kemendikdasmen dalam setiap kegiatan organisasi. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan, pembinaan perilaku, keteladanan pimpinan, serta pengawasan etika kerja agar seluruh pegawai mampu menunjukkan integritas, profesionalitas, dan semangat melayani dalam setiap aktivitas pelayanan publik.

2. Penguatan tata kelola organisasi dan percepatan digitalisasi layanan

Transformasi digital akan terus diakselerasi untuk mewujudkan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh guru serta tenaga kependidikan di seluruh Aceh. Hal ini mencakup pemanfaatan sistem berbasis daring untuk penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi, pendampingan, layanan konsultasi, serta pengelolaan dokumen administrasi. Digitalisasi diharapkan dapat meminimalkan hambatan geografis dan memperluas akses layanan pembelajaran.

3. Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan manajemen perubahan

Pengembangan kompetensi pegawai menjadi prioritas utama melalui pelatihan internal Reformasi Birokrasi, coaching kinerja, workshop manajemen kelembagaan, serta penguatan kepemimpinan operasional. Selain itu, pembentukan agen perubahan di lingkungan BGTK Provinsi Aceh akan memastikan adanya motor penggerak yang terus mendorong inovasi, disiplin, dan perubahan positif dalam budaya kerja organisasi.

4. Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK

BGTK Provinsi Aceh berkomitmen mengintegrasikan praktik perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kinerja, serta pengawasan secara konsisten melalui penerapan SAKIP yang kuat. Sejalan dengan itu, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan dilaksanakan melalui peningkatan transparansi layanan, pencegahan korupsi, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme pengaduan layanan. Integrasi kedua sistem ini diharapkan dapat menghasilkan birokrasi yang bersih, melayani, dan akuntabel.

5. Optimalisasi monitoring dan evaluasi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkualitas

Monitoring dan evaluasi kinerja akan diperkuat melalui pemanfaatan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Penguatan Sistem Informasi Manajemen Data Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan akan menjadi basis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan program. Dengan demikian, setiap keputusan strategis dapat diambil berdasarkan bukti (evidence-based), selaras dengan kebutuhan lapangan, serta mampu meningkatkan kualitas layanan BGTK Provinsi Aceh secara menyeluruh.

Kesiapan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan proses panjang yang telah dimulai bertahun-tahun sebelumnya melalui internalisasi tata nilai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Internalisasi nilai ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap pegawai memiliki komitmen moral, etika kerja, dan profesionalisme sesuai tuntutan birokrasi modern.



Seluruh pegawai BGTK Provinsi Aceh sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berpegang pada nilai dasar (*core values*) ASN yang dirumuskan dalam akronim BERAKHLAK, yang menjadi standar perilaku dan budaya kerja di seluruh instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Kemendikdasmen. Nilai BERAKHLAK tidak hanya menjadi panduan etik, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan menuju birokrasi yang melayani, bersih, responsif, dan berkinerja tinggi, Nilai-nilai tersebut meliputi:

1. Berorientasi Pelayanan

Setiap pegawai diharapkan mampu memahami kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan layanan terbaik secara ramah, cepat, responsif, dan solutif. Semangat pelayanan ini juga menuntut adanya inovasi dan perbaikan berkelanjutan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin berkualitas.

2. Akuntabel

Pegawai wajib melaksanakan tugas secara jujur, transparan, disiplin, dan penuh integritas. Penggunaan anggaran dan aset negara dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Sikap akuntabel ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap BGTK Provinsi Aceh.

3. Kompeten

Setiap individu dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui pembelajaran dan pengembangan kompetensi sesuai perkembangan teknologi, kurikulum, dan kebutuhan dunia pendidikan. Nilai ini juga menekankan peran pegawai sebagai pembelajar sepanjang hayat yang mampu menghasilkan kinerja berkualitas.

4. Harmonis

Lingkungan kerja diwujudkan dengan mengedepankan penghargaan terhadap keberagaman, sikap saling menghormati, dan kemauan untuk membantu rekan kerja. Suasana kerja yang nyaman dan saling mendukung menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kolaborasi.

5. Loyal

Loyalitas pegawai tercermin dari sikap setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang sah. Selain itu,



pegawai harus menjaga nama baik institusi dan rekan kerja serta memegang teguh kerahasiaan jabatan. Loyalitas ini menjadi perekat semangat kolektif dalam menjalankan tugas negara.

6. Adaptif

Setiap pegawai didorong untuk cepat merespon perubahan, terutama dalam dinamika kebijakan pendidikan, transformasi digital, dan kebutuhan masyarakat. Nilai ini menekankan pentingnya kreativitas, inovasi, dan sikap proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan birokrasi modern.

7. Kolaboratif

Pegawai dituntut membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal dan memperkuat sinergi antarinstansi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Aceh.

Penerapan nilai BERAHLAK secara konsisten di lingkungan BGTK Provinsi Aceh tidak hanya membentuk budaya kerja yang profesional, tetapi juga mempercepat proses transformasi layanan publik di bidang pengembangan guru dan tenaga kependidikan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap proses kerja—mulai dari perencanaan program, pelaksanaan pelatihan, layanan konsultasi, hingga evaluasi—BGTK Provinsi Aceh berupaya menghadirkan layanan yang lebih responsif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pendidikan di Aceh. Hal ini menjadi penting mengingat tantangan kualitas pendidikan yang dihadapi Aceh menuntut hadirnya birokrasi yang adaptif dan mampu menjawab persoalan secara cepat dan tepat.

Dengan menginternalisasi nilai-nilai BERAHLAK secara utuh, BGTK Provinsi Aceh tidak hanya memperkuat integritas internal lembaga, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pendidikan. Nilai-nilai ini menjadi kompas moral dan profesional bagi seluruh pegawai dalam menghadapi tantangan reformasi birokrasi, transformasi digital, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Ke depan, komitmen terhadap nilai BERAHLAK akan terus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan organisasi yang modern, melayani, serta mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Aceh.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh (BGTK Provinsi Aceh) menetapkan target kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap mulai tahun 2025 sampai tahun 2029. Target kinerja ditetapkan pada setiap IKK, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Target Kinerja BGTK Provinsi Aceh Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah				
	2025	2026	2027	2028	2029
SK.1 - Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan					
[IKK 1.1] - Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1.44 %	3.13 %	4.93 %	6.92 %	9.1 %
SK.2 - Meningkatnya Tata Kelola Balai GTK Provinsi Aceh					
[IKK 2.1] - Capaian NKA Balai GTK Provinsi Aceh minimal sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
[IKK 2.2] - Predikat AKIP Balai GTK	A	A	A	A	A

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada [IKK 1.1], [IKK 2.1] dan [IKK 2.2] baru terdapat target kinerja pada tahun 2025, hal ini dikarenakan Rencana Strategis Kemendikdasmen maupun Ditjen GTKPG masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga Renstra BGTK Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2029 masih perlu dilakukan penyempurnaan terkait target kinerja pada periode tahun 2026 - 2029. Perlu dipahami bahwa ukuran satuan target pada [IKK 1.1] ini adalah persentase orang, baik guru maupun tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran.

Guna mencapai target kinerja pada SK.1, perlu adanya beberapa langkah strategis yang harus dilakukan, antara lain :

1. Melakukan evaluasi internal secara rutin antara unsur Pimpinan dan Kelompok Kerja yang bertugas menangani program/kegiatan untuk mengukur ketercapaian target kinerja;

- 
2. Secara rutin berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Setempat untuk mendukung Program Kemendikdasmen, dan
 3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

Sasaran Kegiatan 2 [SK 2] yaitu Meningkatnya Tata Kelola BGTK Provinsi Aceh, memiliki 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). [IKK 2.1] yaitu Capaian NKA Balai GTK Provinsi Aceh minimal Sangat Baik, [IKK 2.2] Predikat AKIP Balai GTK diharapkan mendapat A. Sebagai bentuk komitmen dalam penegakan Reformasi Birokrasi, [SK 2] perlu mendapat perhatian lebih agar mampu tercapai pada akhir periode Renstra. Tercapainya target kinerja pada [SK 2] menunjukkan adanya upaya yang nyata dan berkelanjutan untuk terus meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Karena itu diperlukan daya upaya yang ekstra guna mengejar ketercapaian target kinerja [SK 2]. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target kinerja pada [SK 2], perlu adanya beberapa strategi yang harus dilakukan :

1. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Setditjen GTKPG dan Biro Perencanaan untuk kualitas AKIP yang lebih baik;
2. Melakukan pengembangan dan peningkatan kompetensi terhadap pegawai khususnya yang bertugas di bidang SAKIP, dan
3. Melakukan evaluasi bersama atas SAKIP di lingkungan BGTK Provinsi Aceh, dengan melibatkan unsur eksternal yang berkompeten di bidangnya.

Target Kinerja BGTK Provinsi Aceh dalam periode Rencana Strategi Tahun 2025 - - 2025 yang terdiri atas 2 Sasaran Kegiatan (SK) dan 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) telah selaras dan sesuai dengan tugasnya yaitu “melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah dan pengawas sekolah” (Pasal 5 Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025 tentang OTK UPT Bidang GTK). Adapun keselarasan Target Kinerja BGTK Provinsi Aceh dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Keselarasan Target Kinerja BGTK Provinsi Aceh dengan Tugas dan Fungsi

Target Kinerja	Tugas (Pasal 5 Permendikdasmen Nomor 5/2025)	Fungsi (Pasal 7 Permendikdasmen Nomor 5/2025)
SK.1 - Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga Kependidikan	UPT Bidang GTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Bidang GTK menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; b. pengembangan model peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; c. pengembangan media pembelajaran guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; d. pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; f. pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; h. pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; dan i. pelaksanaan urusan administrasi.
IKK 1.1 - Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran		
SK.2 - Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Aceh		
IKK 2.1 - Capaian NKA Balai GTK Provinsi Aceh minimal sangat baik		
IKK 2.2 - Predikat AKIP Balai GTK		

Dari Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa antara Target Kinerja, Tugas dan Fungsi BGTK Provinsi Aceh memiliki keselarasan yaitu bertujuan untuk menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan melalui perwujudan persentase guru dan tenaga kependidikan profesional, serta menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

B. Kerangka Pendanaan

Upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BGTK Provinsi Aceh memerlukan dukungan pendanaan yang terencana, terukur, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, penyusunan kerangka pendanaan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal selama periode Renstra berlangsung.

Kerangka pendanaan disusun sebagai gambaran kebutuhan anggaran lima tahunan yang mengacu pada prioritas program, target kinerja, serta kebijakan nasional di sektor pendidikan. Pada tahun anggaran yang sedang berjalan (2025), pagu anggaran telah bersifat pasti (fixed) karena telah ditetapkan melalui mekanisme RKKS. Sementara itu, kebutuhan pendanaan untuk tahun-tahun berikutnya (2026–2029) masih bersifat indikatif, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian sesuai perkembangan kebijakan, dinamika fiskal pemerintah, maupun hasil evaluasi pelaksanaan program.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kerangka Pendanaan Renstra BGTK Provinsi Aceh dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1. Pagu Tahun 2025, yang telah ditetapkan secara final berdasarkan RKKS.
2. Pagu Indikatif Tahun 2026–2029, yang akan disesuaikan dan diperbarui dalam penyusunan perubahan Renstra atau melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan berikutnya.

Pembagian ini memastikan bahwa perencanaan pendanaan BGTK Provinsi Aceh tetap fleksibel, responsif, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta arah kebijakan pendidikan nasional.

Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Pagu 2025

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Pendanaan
	2025
[SK 1] - Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	
IKK 1.1 - Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	25.957.104.000
[SK 2] - Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Aceh	
IKK 2.1 - Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Aceh minimal sangat baik	112.284.000
IKK 2.2 - Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Aceh minimal A	5.739.665.000
Jumlah	31.839.053.000

Kerangka pendanaan untuk tahun 2025 hanya mencakup satu tahun anggaran, mengingat BGTK Provinsi Aceh baru memasuki periode Rencana Strategis 2025–2029. Dengan demikian, alokasi anggaran yang tersedia pada tahap awal penyusunan Renstra ini hanya tercantum untuk Tahun Anggaran 2025, yaitu sebesar Rp31.839.053.000,- (Tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu rupiah).

Besaran anggaran tersebut bersumber dari Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) Tahun Anggaran 2025, yang menjadi dasar perencanaan operasional dan pembiayaan program di tahun pertama periode Renstra. Seiring berjalannya proses penyusunan pagu indikatif untuk tahun 2026–2029, kerangka pendanaan BGTK Provinsi Aceh pada tahun-tahun berikutnya akan diperbarui dan disesuaikan dalam dokumen perubahan Renstra, agar tetap selaras dengan prioritas nasional, kebutuhan daerah, serta dinamika kebijakan anggaran pemerintah.

Tabel 4. 4 Kerangka Pendanaan Pagu 2026 - 2029

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Pendanaan			
	2026	2027	2028	2029
[SK 1] - Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan				
[IKK 1.1] - Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	34.937.762.000	-	-	-
[SK 2] - Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Aceh				
[IKK 2.1] - Capaian NKA Balai GTK Provinsi Aceh minimal sangat baik	110.184.000	-	-	-
[IKK 2.2] - Predikat AKIP Balai GTK	14.294.202.000	-	-	-
Jumlah	49.342.148.000	-	-	-

Pagu anggaran tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.4, yaitu sebesar Rp49.342.148.000,- (Empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), merupakan pagu indikatif yang bersumber dari aplikasi SAKTI (<https://sakti.kemenkeu.go.id/>) Kementerian Keuangan. Nilai



tersebut masih bersifat sementara dan sangat mungkin mengalami penyesuaian sesuai dinamika proses perencanaan dan penganggaran nasional, termasuk hasil pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait.

Demikian pula untuk pagu anggaran tahun 2027–2029, yang pada tahap penyusunan Renstra saat ini belum dapat dirinci karena menunggu penetapan resmi dari Kemendikdasmen maupun Ditjen GTKPG. Seluruh rincian anggaran untuk periode tersebut akan diperbarui dan dituangkan dalam dokumen perubahan Renstra berikutnya, sehingga perencanaan dapat tetap selaras dengan kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan strategis BGTK Provinsi Aceh.

Sejalan dengan itu, BGTK Provinsi Aceh terus memastikan bahwa proses penyusunan kebutuhan anggaran dilakukan secara akuntabel, berbasis data, dan mencerminkan prioritas strategis lembaga, terutama pada aspek pengembangan kompetensi guru serta penguatan tata kelola internal. Setiap tahun, kebutuhan anggaran akan dianalisis melalui evaluasi capaian kinerja, hasil monitoring program, serta pemetaan kebutuhan daerah sehingga usulan anggaran yang diajukan tetap relevan dan proporsional. Selain mengacu pada pagu indikatif nasional, perencanaan anggaran juga mempertimbangkan tantangan geografis Aceh, variasi kebutuhan kompetensi GTK, serta tuntutan transformasi digital yang semakin meningkat.

Dengan mekanisme ini, diharapkan pengelolaan anggaran untuk periode 2026–2029 dapat mendukung pencapaian sasaran strategis BGTK Provinsi Aceh secara optimal, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan pengembangan dan pemberdayaan guru serta tenaga kependidikan di seluruh wilayah Aceh. Komitmen untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan nasional.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BGTK sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemberdayaan guru serta tenaga kependidikan di Provinsi Aceh. Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterpaduan (*alignment*) serta keselarasan secara hierarkis (*cascading*) dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2025-2029. Selain itu, berbagai perkembangan isu strategis di sektor pendidikan Aceh turut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan dan sasaran strategis.

Renstra BGTK Provinsi Aceh Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan implementasi program prioritas di tingkat satuan kerja. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi pencapaian, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target-target strategis secara terukur dan berkelanjutan. Seiring pelaksanaan Renstra, mekanisme evaluasi, monitoring, serta langkah korektif akan terus dilakukan guna memastikan peningkatan kualitas layanan dan terjaminnya efektivitas program yang dijalankan.

Perubahan ekosistem pendidikan, transformasi digital, dinamika kebijakan nasional, serta kebutuhan daerah yang berkembang merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus direspons secara adaptif. Oleh karena itu, Renstra ini bersifat *living document* dapat dilakukan penyesuaian atau revisi jika terdapat perubahan kebijakan strategis di tingkat kementerian maupun daerah. BGTK Provinsi Aceh berkomitmen untuk terus memperbarui arah dan strategi pelaksanaan program, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan serta selaras dengan agenda pembangunan pendidikan nasional.

Dengan tersusunnya Renstra BGTK Provinsi Aceh Tahun 2025-2029, diharapkan dokumen ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengarahkan perencanaan kinerja yang berkualitas, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta mendukung



terwujudnya layanan pendidikan yang profesional, inklusif, dan berdaya saing di seluruh wilayah Aceh.

Dengan tersusunnya Renstra BGTK Provinsi Aceh Tahun 2025-2029, diharapkan dokumen ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengarahkan perencanaan kinerja yang berkualitas, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta mendukung terwujudnya layanan pendidikan yang profesional, inklusif, dan berdaya saing di seluruh wilayah Aceh.

Selain itu, Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman yang konsisten bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan BGTK Provinsi Aceh dalam melaksanakan transformasi pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan sebagai aktor kunci dalam peningkatan mutu pembelajaran. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta mitra strategis lainnya, BGTK Provinsi Aceh optimis dapat berkontribusi secara nyata terhadap penguatan ekosistem pendidikan Aceh yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan.

Semoga Renstra ini menjadi landasan yang kokoh bagi perencanaan dan pelaksanaan program selama lima tahun ke depan, serta mampu menginspirasi lahirnya inovasi dan terobosan baru demi kemajuan pendidikan Aceh dan Indonesia secara keseluruhan.

Sasaran Kinerja 1.0

Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan

IKK 1.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran

Guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran adalah mereka yang telah mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengajar dan mendidik siswa. Program ini bertujuan untuk membantu guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Dalam program ini, guru dan tenaga kependidikan dapat memperoleh:

1. Pelatihan dan pengembangan profesional: Pelatihan dan workshop yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar dan mendidik siswa.
2. Pengembangan kurikulum: Kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan industri.
3. Penggunaan teknologi: Pelatihan dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
4. Mentorship dan coaching: Kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan dari mentor atau coach yang berpengalaman.
5. Komunitas belajar: Kesempatan untuk bergabung dengan komunitas belajar yang memungkinkan guru dan tenaga kependidikan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.

Dengan demikian, guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengajar dan mendidik siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Definisi Operasional	
Satuan	Persentase
Tipe Penghitungan	Non Kumulatif Dihitung berdasarkan Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran.
Metode Penghitungan	Rumus : Keterangan : A = Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran
Sumber Data	Laporan Internal
Person in Charge (PIC)	Tim Kerja Pemetaan Kompetensi GTK, Tim Kerja Peningkatan Kompetensi GTK, Tim Kerja Fasilitasi dan Kemitraan Pengembangan Kompetensi GTK

Sasaran Kinerja 2.0

Meningkatnya Tata Kelola Balai GTK Provinsi Aceh

IKK 2.1 Capaian NKA Balai GTK Provinsi Aceh minimal sangat baik

Definisi Operasional	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGTK Provinsi Aceh merupakan gabungan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dari Aplikasi SMART dengan bobot 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Aplikasi IKPA dengan bobot 40%. Nilai Kinerja Anggaran bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.
Satuan	Nilai
Tipe Penghitungan	Non Kumulatif Dihitung berdasarkan akumulasi nilai dari bobot EKA (60%) dan IKPA (40%)
Metode Penghitungan	Rumus : $NKA = [60\% \times EKA] + [40\% \times IKPA]$ Keterangan : • NKA = Nilai Kinerja Anggaran • EKA = Evaluasi Kinerja Anggaran • IKPA = Indikator Kinerja Penilaian Anggaran
Sumber Data	Laporan Internal
Person in Charge (PIC)	Tim Keuangan

Sasaran Kinerja 2.0 Meningkatnya Tata Kelola Balai GTK Provinsi Aceh

IKK 2.2 Predikat AKIP Balai GTK

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Definisi Operasional

Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Satuan

Predikat

Tipe Penghitungan

Non Kumulatif

Dihitung berdasarkan akumulasi nilai dari setiap indikator

Rumus :

Nilai SAKIP =

[30% x Perencanaan] + [30% x Pengukuran] + [15% x Pelaporan] + [25% x Evaluasi]

Metode Penghitungan

Keterangan :

Nilai SAKIP kemudian dikonversi menjadi predikat sebagaimana berikut :

- Nilai 90 - 100 = Predikat AA
- Nilai 80 - 90 = Predikat A
- Nilai 70 - 80 = Predikat BB
- Nilai 60 - 80 = Predikat B
- Nilai 50 - 60 = Predikat CC
- Nilai 30 - 50 = Predikat C
- Nilai 0 - 30 = Predikat D

Sumber Data

Laporan Internal

Person in Charge (PIC)

Tim SAKIP

